

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI KEUANGAN

www.bppk.denkeu.go.id

Edisi 7/2011



Mengenalkan
Nota Keuangan



Menjadi Widyaiswara BPPK
It's My Passion



**Hangatnya Diklat
di Negeri Kincir Angin**



DESAIN KURIKULUM
Berbasis
Kompetensi

ISSN: 2086-4833



9 712086 483008

**Keluarga Besar
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan**

mengucapkan

**Selamat Hari Raya Idul Fitri
1432 Hijriyah**

Minal aidin wal faizin

Mohon maaf lahir dan batin



Daftar Isi

3 Aula Utama

Rancang bangun diklat, bagi suatu institusi pendidikan dan pelatihan seperti BPPK, merupakan *core competence* yang secara hakiki membedakan BPPK dengan unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan. Tentunya, untuk benar-benar menjadi 'beda' dan 'dikenal', *core competence* ini harus senantiasa diasah. Berbagai upaya telah ditempuh BPPK, antara lain dengan mengembangkan kapasitas SDM-nya, terutama di bidang curriculum design.



RANCANG BANGUN DIKLAT Kompetensi inti yang kian mengkilat

18 Ruang Khusus

Hangatnya Diklat di Negeri Kincir Angin



50 Selasar Alumni



Disiplin Hidup Gaya Jepang

45 Ornamen



PEMIMPIN "JENIUS"

Aula Utama	3
Ruang Khusus	18
Gerai Pusdiklat dan STAN	20
Serambi Ilmu	23
Ruang Punawarman	29
Balai-balai	31
Dinding Widyaiswara	38
Ornamen	45
Sofa	49
Selasar Alumni	50
Jendela	52
Zona BPPK	53
Karikatur	54
Galeri	55

Salam Redaksi

Tak terasa kita sudah melewati pertengahan tahun. Merupakan saat yang tepat bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat kembali apa yang telah terjadi. Ada prestasi yang membanggakan yang telah kita capai, ada rintangan yang kita selesaikan. Selain kebahagiaan, kita juga tidak boleh melupakan kegagalan yang kita alami. Pertengahan tahun merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi dan mencari akar permasalahan, sehingga seiring berjalannya waktu kita bisa berproses menuju kesempurnaan. Demikian juga dengan majalah ini. Rintangan yang ada diyakini sebagai suatu kesempatan untuk berproses menuju kesempurnaan.

Beberapa waktu yang lalu, BPPK berkesempatan untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Shortcourse Of Curriculum Design and Assesment for Educational Innovation di Vrije Universiteit, Amsterdam Belanda. Di edisi ini, salah satu tahapan dalam pengembangan program diklat yaitu Curriculum Design kami ketengahkan sebagai isu utama yang bisa Anda simak di Aula Utama. Para peserta shortcourse juga melakukan study visit di Rijksacademie Voor Financien en Economie. Potret tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan Kerajaan Belanda ini kami hadirkan di rubrik Ruang Khusus.

Pertengahan tahun berarti saatnya kita menyimak penyampaian Nota Keuangan yang kami bahas di Serambi Ilmu. Tahun ini, BPPK juga menyambut para widyaiswara yang baru bergabung. Bagi anda yang berminat untuk mengikuti seleksi widyaiswara berikutnya, anda bisa mendapatkan banyak informasi terkait seleksi ini di Ruang Purnawarman. Kabar lain dari unit BPPK bisa disimak lewat tulisan di Gerai Pusediklat dan STAN serta Balai-Balai.

Kami juga menghadirkan tulisan tentang pengalaman pegawai yang menjalani tugas belajar di luar negeri melalui Program Beasiswa BPPK di Selasar Alumni. Kali ini, Kodirin akan menceritakan pengalaman yang dia dapat selama menempuh program master di Jepang. Sejenak mengasah otak melalui TTS Keuangan di rubrik Sofa. Jangan lewatkan rubrik Ornamen, Zona BPPK, Jendela, Karikatur, dan Galeri yang biasa menyapa anda dengan keunikannya masing-masing.

Tak henti-hentinya kami mengundang anda untuk mengirimkan tulisan untuk memperkaya isi majalah Edukasi Keuangan. Tulisan anda kami tunggu di edukasikeuangan@gmail.com. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah mengirimkan tulisan, dan mohon maaf apabila belum semua tulisan yang masuk dapat kami muat karena keterbatasan yang ada.

Selamat menikmati.

Susunan Redaksi



Penasehat :

Kepala BPPK

Pengarah :

Kapusdiklat PSDM
Kapusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan
Kapusdiklat Bea dan Cukai
Kapusdiklat Pajak
Kapusdiklat Keuangan Umum
Kapusdiklat KNPk
Direktur STAN

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Redaksi

Iqbal Soenardi

Wakil Pemimpin Reaksi

Setyawan Dwi Antoro

Redaktur

Ganti Lis Ariyadi
Ismoyo Sejati
Pratin
Sintawati
Soffan Marsus
Rahadi Nugroho
Suroho
Tanda Setiya
Agus Sunarya Sulaeman
Rohani
Sampurna Budi Utama

Penyunting/Editor

Wawan Ismawandi
Pilar Wirotama
Sera Betania
Yohana Tolla
Fotografer
Anggiat Silalahi
Eros Lassa Mursalin
Desain Grafis
Riko Febrialdo
Victorianus M.I. BimoAdi
Sekretariat
Alyn Dwi Setyaningrum
Diah Nofita Rini
Hendra Putra Irawan

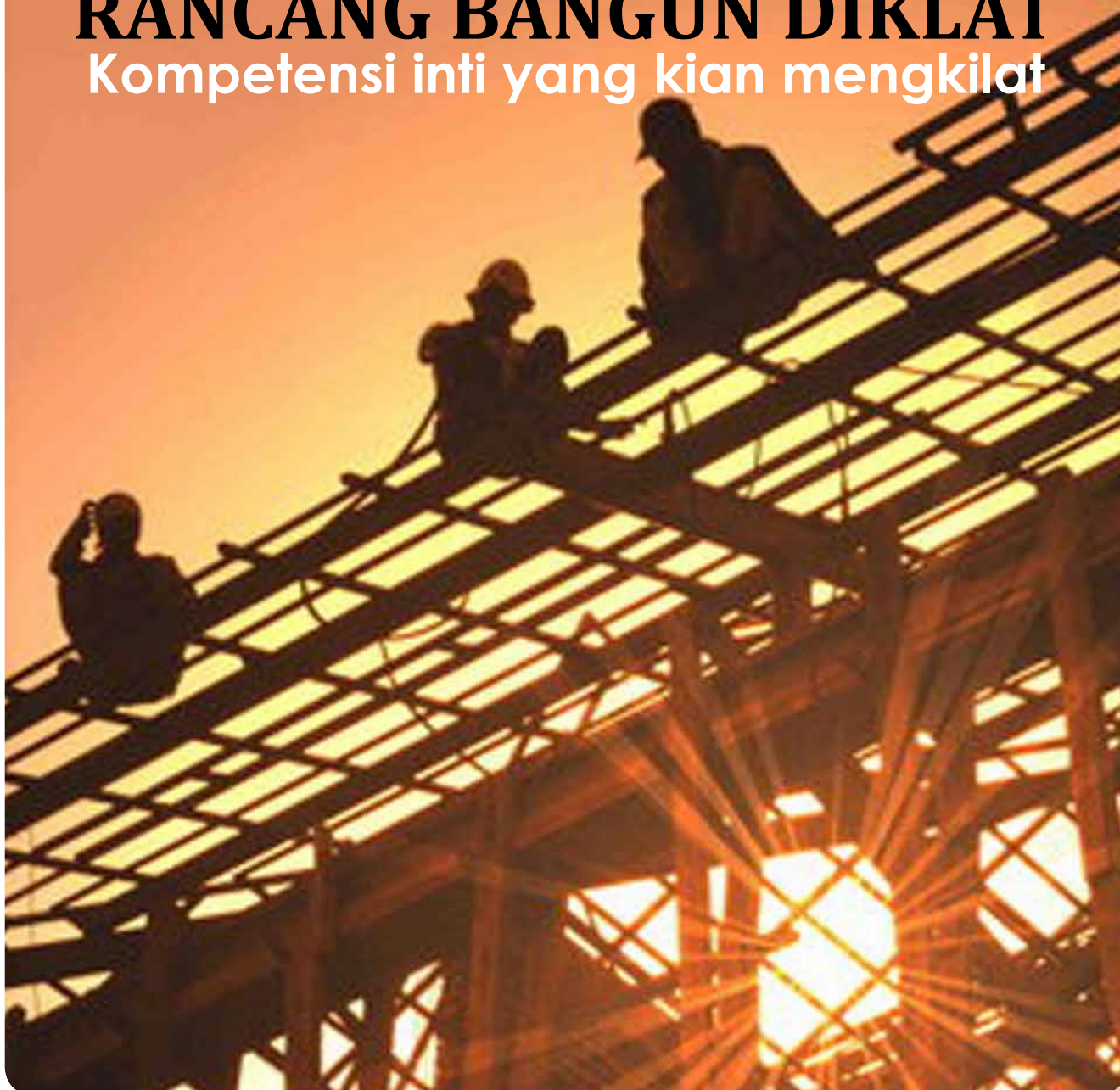
Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5* maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirim ke edukasikeuangan@gmail.com. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

RANCANG BANGUN DIKLAT

Kompetensi inti yang kian mengkilat




Rancang bangun diklat, bagi suatu institusi pendidikan dan pelatihan seperti BPPK, merupakan *core competence* yang secara hakiki membedakan BPPK dengan unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan. Tentunya, untuk benar-benar menjadi 'beda' dan 'dikenal', *core competence* ini harus senantiasa diasah. Berbagai upaya telah ditempuh BPPK, antara lain dengan mengembangkan kapasitas SDM-nya, terutama di bidang *curriculum design*.

Salah satu kegiatan yang belum lama dilakukan adalah pengiriman 20 orang pegawai BPPK untuk belajar tentang *curriculum design* di Vrije Universiteit, Amsterdam. Kegiatan yang merupakan kerjasama BPPK dengan Nuffic-NESO ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penajaman *core competence* BPPK dalam menghasilkan program-program diklat yang tidak hanya efektif menutup kesenjangan kompetensi, tapi juga

memberikan kesan mendalam yang menebarkan citra positif BPPK.

Pada Aula Utama edisi ini, kami sajikan buah tangan dari Negeri Kincir Angin yang dirangkum dalam satu topik desain kurikulum. Tiga tulisan berikut menyajikan alur rancang bangun kurikulum, yang dilengkapi dengan beberapa contoh metode pembelajaran yang sebagian merupakan model yang belum terlalu familiar di dunia diklat publik negeri ini. Semoga bermanfaat. ■ GTi.



COMPETENCE-BASED CURRICULUM DESIGN :
“SEGENGAM ILMU MENUJU
PENYEMPURNAAN”

Oleh: Nova Mardianti

Esensi kurikulum pada dasarnya adalah suatu pattern yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Disadari atau tidak, esensi kurikulum tersebut sebenarnya senantiasa digunakan dalam setiap aspek kehidupan yang direpresentasikan dalam bentuk perencanaan. Perencanaan hampir selalu dilibatkan dalam setiap aktivitas guna mencapai hasil yang diharapkan.

Adalah suatu idealisme klasik bahwa perencanaan yang matang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Jika dituangkan dalam konteks pendidikan dan pelatihan (baca: diklat), kurikulum yang akurat dibutuhkan untuk mewujudkan program diklat yang tepat sasaran.

Sebatas suatu pengandaian, jika Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah tempat tujuan yang ingin dicapai, maka peta dan beragam petunjuk menuju BPPK adalah acuan perjalanan. Tentu saja, perjalanan menuju BPPK tersebut dapat menempuh beragam jalur berdasarkan trial and error atau bertanya di sepanjang perjalanan. Namun, akan jauh lebih efisien jika perjalanan tersebut mengacu pada peta dan beragam petunjuk yang telah diteliti sebelumnya.

Demikian halnya dengan program diklat. Suatu program diklat akan mampu mencapai tujuan secara efektif, berupa peningkatan kompetensi peserta diklat sesuai dengan ekspektasi *stakeholders*, jika implementasi program diklat tersebut memiliki dan mengacu pada kurikulum yang didesain secara tepat.

Desain kurikulum, yang merupakan tahapan vital dalam perencanaan program diklat, utamanya membutuhkan pemikiran dan penelitian yang mendalam. Disamping itu juga memerlukan sumber data yang valid dan keterlibatan aktif kedua belah pihak (pengelola dan pengguna diklat).

Ekspektasi *stakeholders*, dinamika lingkungan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang demikian pesat menguji keandalan suatu desain kurikulum. Desain kurikulum yang akurat adalah kurikulum yang mampu menyediakan acuan bagi penyelenggaraan program diklat sehingga mampu menjawab tuntutan atas ketiga unsur dimaksud.

DEFINISI DAN URGENSI

Mengemban tugas sebagai sentra-diklat keuangan dan kekayaan negara menuntut BPPK untuk terus melakukan penyempurnaan. Kualitas program diklat tentu menjadi puncak layanan BPPK terhadap *stakeholders*. Program diklat perlu didesain sedemikian rupa sehingga kebutuhan *stakeholder* sdapat terpenuhi.

Disinilah suatu proses desain kurikulum yang andal menempati peran

penting. Kurikulum dapat dikatakan inti dari efektivitas program diklat. Kurikulum diklat perlu dirancang sehingga mampu menjawab permasalahan *stakeholders* yang memerlukan diklat sebagai solusi.

Ketepatan suatu desain kurikulum membuka jalan menuju penyempurnaan program diklat karena kurikulum menyediakan acuan untuk: (i) penyediaan layanan diklat yang lebih terencana dan efektif; (ii) pencapaian hasil yang lebih nyata karena adanya arah dan sasaran yang dirumuskan; (iii) pembaharuan mutu melalui pelaksanaan evaluasi atas implementasi kurikulum dimaksud.

Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai **“suatu rencana pembelajaran”**. Dalam konteks program diklat, kurikulum terdiri atas kumpulan mata diklat disertai substansi atau materi, proses pembelajaran, metode belajar mengajar, pengelolaan waktu dan beragam unsur lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkat *skill*, *knowledge* dan *attitude* tertentu.

Ibarat sebuah resep masakan, kurikulum berisikan bahan baku ilmu, *knowledge* dan *skill* yang akan dicapai, ditambah bumbu-bumbu *behavior* dan *attitude* yang ingin dikembangkan, diramu dalam suatu olahan menggunakan perangkat masak tenaga pengajar, buku-buku referensi, dan metode pembelajaran yang disusun pengimplementasiannya secara sistematis disertai durasi waktu yang diperlukan masing-masing tahapan, sehingga menghasilkan program diklat yang berkualitas dengan kemasan menarik sebagai masakan bercita-rasa tinggi.

Untuk itu, penyusunan kurikulum diklat membutuhkan landasan yang kuat

didasari oleh hasil penelitian dan pemikiran secara mendalam. Sumber penyusunan kurikulum diklat juga harus komprehensif, yang mencakup kebutuhan *stakeholders* (sebagai sumber utama) disertai dengan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, *trend* dan kebutuhan sosial, serta ketertarikan dari para peserta diklat. Dengan demikian, program diklat yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tapi juga menarik dan membangkitkan minat peserta.

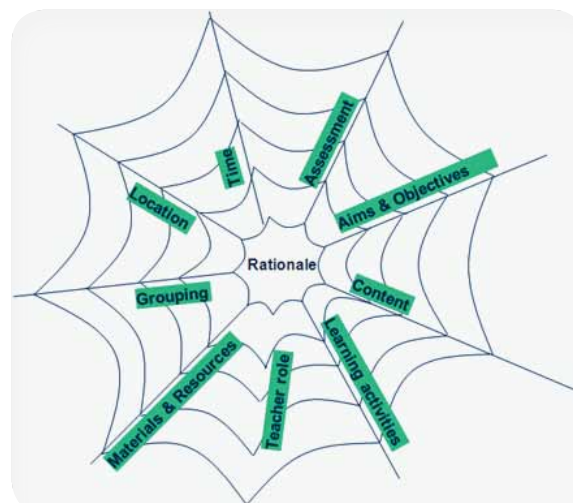
Terkait dengan sumber penyusunan kurikulum, kompetensi dapat dijadikan sebagai pijakan dalam desain kurikulum diklat. Desain kurikulum dengan basis kompetensi dikenal dengan *Competence-based Education* yang mengintegrasikan *knowledge*, *skill* dan *attitude* dalam pembelajaran dan *assessment*.

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai berikut:

“Kompetensi adalah kemampuan untuk memilih dan mengaplikasikan suatu kombinasi antara *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang terintegrasi dengan fokus terhadap penyelesaian suatu tugas pada suatu konteks tertentu”

Ibarat resep masakan yang menentukan cita rasa masakan, maka kurikulum diklat juga akan menentukan kualitas dari program diklat yang dihasilkan. Untuk itulah, desain kurikulum merupakan tahapan yang tak terelakkan peran pentingnya dalam upaya menghasilkan program diklat yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

10 hal u t a m a yang perlu dijawab oleh desain kurikulum diklat:



Gambar 1.
The Curricular Spider Web

1. **Rationale/Mission** – Mengapa peserta diklat ingin belajar?
2. **Aims & Objective** – Apa tujuan yang ingin dicapai?
3. **Content** – Apa yang peserta diklat pelajari?
4. **Learning Activities** – Bagaimana peserta diklat belajar?
5. **Teacher Role** – Bagaimana pengajar memfasilitasi proses belajar mengajar?
6. **Materials & Resources** – Dengan apa peserta diklat belajar?
7. **Grouping**– Bersama siapa peserta diklat belajar?
8. **Location** – Dimana peserta diklat belajar?
9. **Time**– Kapan peserta diklat belajar?
10. **Assessment**– Seberapa jauh kemajuan dari hasil pembelajaran?

SUATU UNTAIAN PROSES

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, desain kurikulum diklat melibatkan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan. Idealnya, desain kurikulum diklat diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor situasional terpenting yang mencakup:

1. Konteks spesifik dari lingkungan pembelajaran, misal : durasi diklat yang dikehendaki *stakeholders*
2. Konteks umum dari lingkungan



pembelajaran, misal : ekspektasi *stakeholders*

3. Sifat dari program diklat, misal : *softskill* atau *hardskill*
4. Karakteristik peserta diklat
5. Karakteristik pengajar

Hasil identifikasi atas faktor-faktor dimaksud digunakan sebagai bahan referensi menuju tahapan proses desain kurikulum selanjutnya. Proses desain kurikulum diklat kemudian dilanjutkan

dari *professional profile* dan *key occupational task*. Perumusan *key competencies* dibedakan dalam 2 bagian:

- (a) *Domain specific competencies*, kelompok *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang bersifat spesifik dan terkait dengan suatu profesi atau bidang tugas tertentu.
- (b) *Generic competencies*, kelompok *knowledge*, *skill* dan *attitude*

(*teaching and learning methods*)

2. Desain rangkaian substansi dan aktivitas pembelajaran (*sequence in content and activities*)
3. Identifikasi ketersediaan sumber daya (*listing resources*)
4. Implementasi *training of trainers*
5. Desain materi pembelajaran (*learning materials*)
6. Desain rencana evaluasi (*assessment plan*)

Output akhir dari proses desain kurikulum adalah rincian rencana pembelajaran yang mampu menjawab 10 pertanyaan utama yang tertuang dalam *the curricular spider web* (Gambar 2).

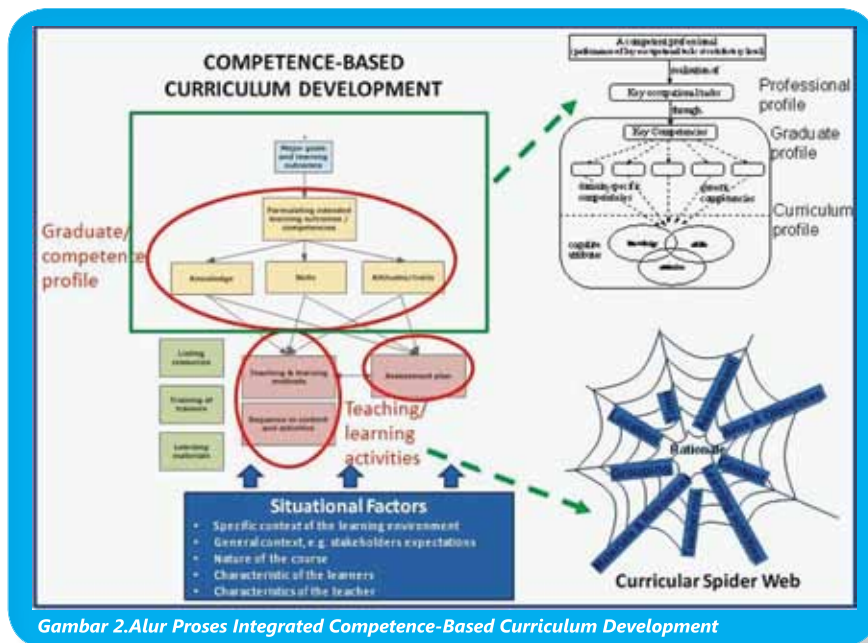
KEBUTUHAN SINKRONISASI

Kurikulum, apapun konteksnya (diklat maupun pendidikan formal), seyogyanya bersifat ideal dan formal; dimengerti oleh pengajar dan dapat di implementasikan; serta sudah diujicobakan dan terdapat hasil yang nyata.

Dalam tatanan praktis, hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dicapai. Dibutuhkan sinergisitas dan sinkronisasi antar setiap tahapan manajemen diklat. Kecil kemungkinan suatu desain kurikulum dapat tepat sasaran tanpa adanya *input* berupa informasi yang akurat. Disinilah sinkronisasi antara hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dan proses desain kurikulum memegang peran yang vital. Hasil AKD dan IKD idealnya merupakan input utama dalam desain kurikulum diklat, dimana penggunaannya perlu disertai dengan beragam sumber lain seperti: kamus kompetensi, uraian jabatan, dan lainnya.

Identifikasi terhadap apa yang telah dimiliki BPPK, pada dasarnya, tahapan desain kurikulum tidak lain merupakan elaborasi atas "kotak" **Desain Program Diklat** yang selama ini tertera dalam alur proses AKD pada Pedoman AKD dan IKD BPPK. Pengelaborasi "kotak" dimaksud membuat BPPK memiliki suatu rangkaian yang utuh atas perencanaan program diklat. (Gambar 3).

Proses desain kurikulum adalah suatu proses berkesinambungan yang



Gambar 2. Alur Proses Integrated Competence-Based Curriculum Development

dengan perumusan tujuan dan hasil pembelajaran yang dituangkan dalam profil kompetensi/lulusan diklat.

Profil kompetensi/lulusan diklat adalah deskripsi atau pernyataan kemampuan dan kompetensi (*competency statement*) yang akan dimiliki peserta diklat setelah mengikuti suatu program diklat. Adapun proses ini melibatkan tahapan:

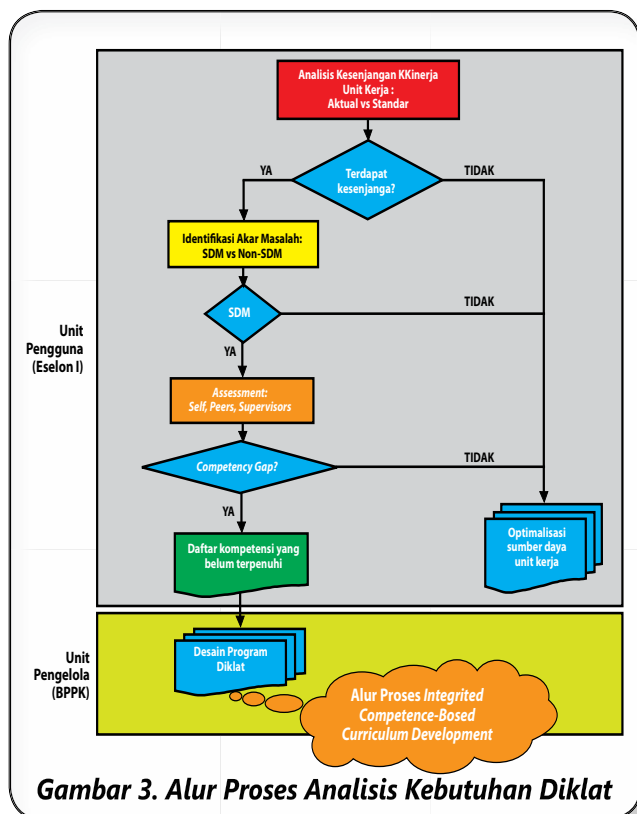
1. Perumusan *professional profile*, deskripsi atas suatu tugas pokok dan fungsi yang diemban calon peserta diklat
2. Perumusan *key occupational task*, ringkasan tugas dan karakteristik permasalahan utama dalam bidang kerja calon peserta diklat.
3. Perumusan *key competencies*, deskripsi kompetensi yang diturunkan

yang dibutuhkan pada seluruh profesi/bidang tugas dan situasi kehidupan.

Mengingat profil kompetensi/lulusan diklat adalah pijakan bagi desain kurikulum diklat, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan mengoptimalkan berbagai sumber informasi, baik primer maupun sekunder. Idealnya, proses ini dilakukan dengan berdasarkan pada kamus kompetensi untuk setiap jabatan sebagai sumber utama, disamping juga data-data pendukung dan informasi lainnya.

Berlandaskan pada profil kompetensi/lulusan diklat, proses desain kurikulum dilanjutkan dengan merumuskan aktivitas belajar mengajar (*teaching/learning activities*) yang mencakup:

1. Desain metode pembelajaran



Gambar 3. Alur Proses Analisis Kebutuhan Diklat

tidak berhenti saat kurikulum selesai dibuat. Idealnya, hingga program diklat diselenggarakan, proses desain kurikulum untuk diklat dimaksud terus berjalan, yaitu berupa *fine tuning* untuk mencapai hasil yang diekspektasikan *stakeholders*.

Memetik ilmu dari *taylor-made-training on curriculum design and assessment for educational innovation* yang diselenggarakan Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, representatif VU melakukan AKD berdasarkan uraian dokumen kebutuhan BPPK yang dilanjutkan dengan wawancara dengan representatif BPPK. Komunikasi intensif kerap kali dilakukan untuk setiap tahapan desain program *shortcourse* yang dilakukan dengan tujuan agar *shortcourse* dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi BPPK.

Tidak berhenti sampai disitu, bahkan penyempurnaan program *shortcourse* dilakukan ketika program sedang dilaksanakan. Pertemuan pertama diawali dengan pemaparan program oleh pihak VU Amsterdam dan dilanjutkan

dengan pemaparan ekspektasi masing-masing peserta *shortcourse* BPPK, baik secara lisan maupun tulisan. Identifikasi kemampuan peserta akan substansi *shortcourse* juga menjadi agenda pertemuan awal tersebut. Disinilah kurikulum program *shortcourse* yang telah didesain VU Amsterdam kembali disinkronisasi, kali ini tidak terhadap hasil AKD tapi terhadap ekspektasi dan hasil identifikasi kemampuan peserta.

Pada tengah *shortcourse* berlangsung, komunikasi VU

pembelajaran, masing-masing peserta diminta untuk melakukan *“reflection”*, semacam refleksi diri untuk melihat peningkatan kompetensi sebagai hasil pembelajaran dan mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang belum terpenuhi. Informasi ini digunakan oleh VU Amsterdam untuk terus menyempurnakan kurikulum program *shortcourse* dimaksud.

Apa yang dilakukan VU Amsterdam tidak serta-merta mengindikasikan suatu kesempurnaan. Namun setidaknya, terdapat beberapa aktivitas manajemen diklat VU Amsterdam yang dapat dipetik disamping juga substansi *shortcourse* dimaksud. Berbagai referensi dan *best practices* lainnya tentu masih beragam dan dapat digunakan untuk memperkaya dan terus menyempurnakan manajemen diklat BPPK, terutama dalam hal desain kurikulum.

SUATU GAGASAN

Dengan diklat sebagai output utama, adalah suatu kebutuhan bagi BPPK untuk terus menyempurnakan proses manajemen diklat, terutama desain kurikulum. Mencapai program diklat yang memenuhi ekspektasi *stakeholders* hanya dapat dilakukan dengan desain kurikulum diklat yang tepat.



Memang bukan hal yang mudah untuk merumuskan suatu kurikulum sehingga sesuai dengan ekspektasi *stakeholders*. Serangkaian aktivitas komunikasi, penelitian dan pemikiran mutlak diperlukan. Validitas sumber informasi merupakan hal yang tidak kalah penting disamping juga keterlibatan dan dukungan banyak pihak.

Beranjak dari implementasi praktis, terdapat 4 (empat) tantangan menuju desain kurikulum diklat yang efektif:

1. *Akurasi hasil AKD atau IKD sebagai acuan utama desain kurikulum*, Tanpa adanya hasil AKD atau IKD yang valid, kecil kemungkinan kurikulum diklat dapat didesain secara akurat. Untuk itu, problematika seputar AKD dan IKD seyogyanya menjadi perhatian dalam rangka menghasilkan input yang valid dan komprehensif bagi proses desain kurikulum.
2. *Ketersediaan sumber informasi pendukung*. Desain kurikulum membutuhkan sumber informasi yang komprehensif, termasuk kamus kompetensi, uraian jabatan, dan beragam informasi lain terkait calon peserta diklat.

3. *Penyempurnaan proses desain kurikulum diklat*. Idealnya, desain kurikulum dilakukan secara berkesinambungan, yaitu : (i) pada persiapan diklat, berupa desain rencana pembelajaran; (ii) selama diklat berlangsung, berupa upaya penyesuaian (*fine tuning*)

kurikulum menuju ekspektasi *stakeholders* berdasarkan hasil evaluasi peserta selama penyelenggaraan diklat; dan (iii) ketika diklat berakhir, berupa evaluasi dan rekomendasi peserta guna penyempurnaan kurikulum diklat berikutnya.

4. Sedikit memetik ilmu dari VU Amsterdam, eksplorasi terhadap ekspektasi peserta diklat dan identifikasi kompetensi peserta diklat sebagai langkah awal fine tuning kurikulum diklat yang akan diselenggarakan

tampaknya cukup baik untuk diadopsi.

Sinergisitas dan sinkronisasi dalam segala hal. Perlu ada langkah yang sinergi dan sinkron dalam proses AKD atau IKD, desain kurikulum, penyelenggaraan, hingga pada evaluasi diklat. Seluruh hasil dari keempat aspek dimaksud pada dasarnya saling berkaitan, saling mendukung dan dapat dijadikan input bagi penyempurnaan satu sama lain.

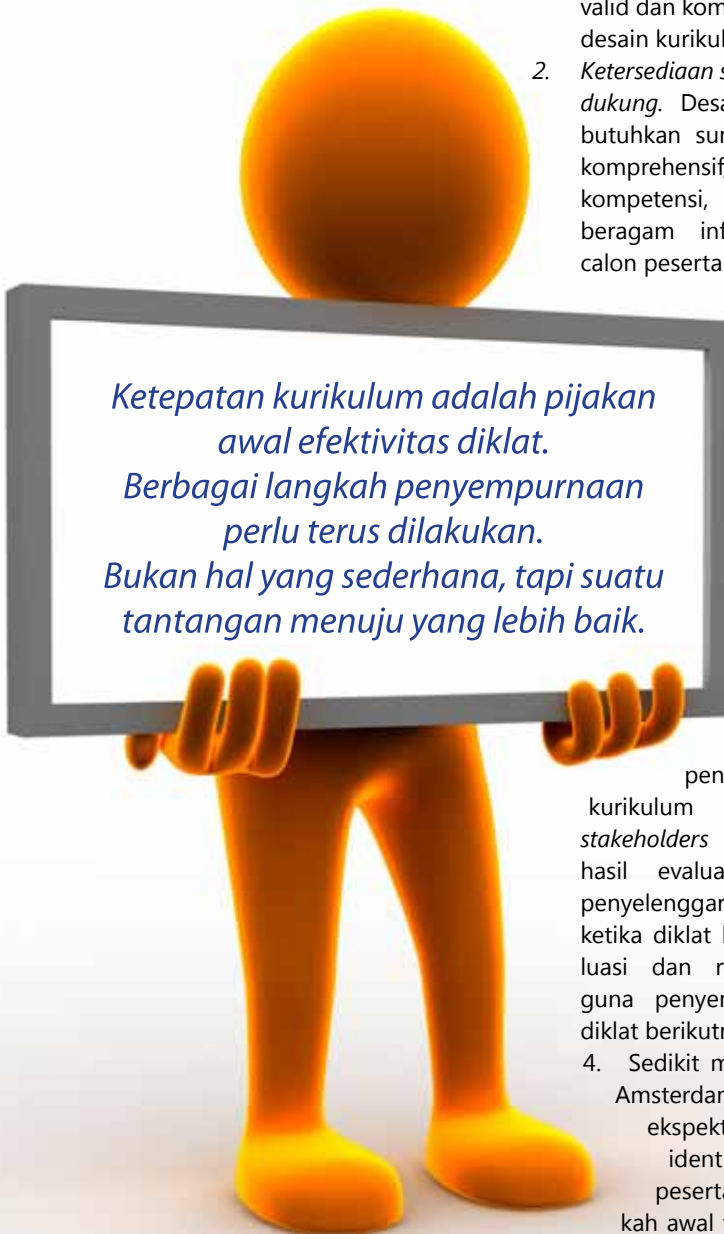
Dalam menyikapi kebutuhan *stakeholders*, kurikulum diklat harus senantiasa disempurnakan. Penyempurnaan kurikulum diklat mencakup semua aspek kurikulum, seperti mata diklat, substansi atau materi, proses pembelajaran, metode belajar mengajar, pengelolaan waktu yang lebih baik, dan perolehan hasil diklat peserta yang tentu lebih baik. Untuk itu, kurikulum harus dinamis, peka dan sekaligus mampu merespon beragam perubahan dan beragam tuntutan *stakeholders*.

Peran aktif BPPK dan keterbukaan *stakeholders* mutlak diperlukan dalam hal ini. *Stakeholders* adalah pihak yang paling mengerti akan kondisi dan kebutuhannya, sementara BPPK adalah unit pengelola diklat. Komunikasi dua arah secara efektif dan intensif antara *stakeholders* (dalam hal ini Unit Eselon I Kementerian Keuangan) sebagai unit pengguna dengan BPPK sebagai unit pengelola diklat diperlukan, baik dalam desain awal kurikulum diklat maupun penyempurnaan desain kurikulum dimaksud. ■

Penulis adalah Pegawai BPPK Tugas Belajar S-2 UGM

Sumber:

- Materi *Shortcourse on Curriculum Design and Assessment for Educational Innovation*, 5 s.d. 29 Mei 2011, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, Netherlands. (Kerjasama BPPK dan Nuffic-Neso Indonesia).





ACTIVE LEARNING

Oleh: Oktavia Ester Pangaribuan*

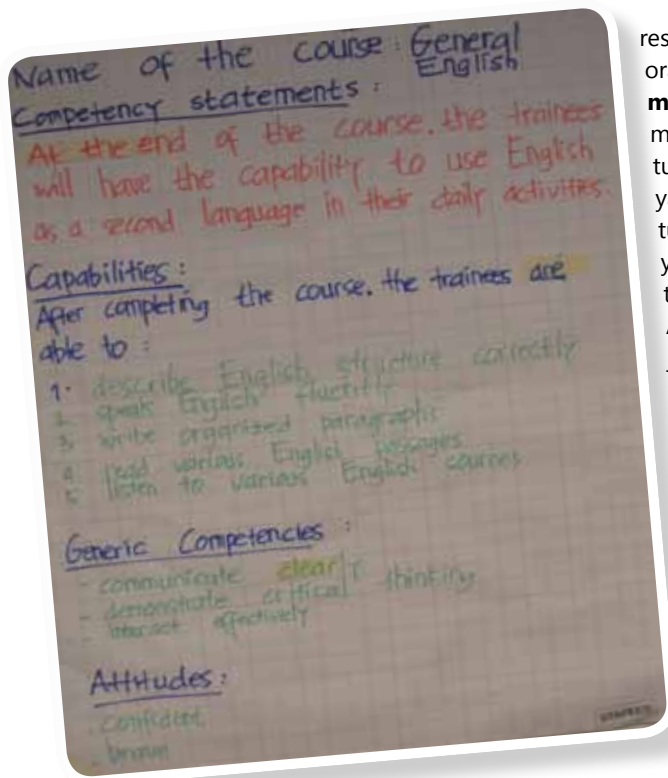
“Active learning lahir dari asumsi bahwa pembelajaran itu merupakan sesuatu yang dilakukan manusia dan setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Jadi belajar bukan difokuskan hanya mendengarkan informasi dari pengajar.”

Pada bulan Mei yang lalu, bersama 19 kolega dari struktural dan Widyaisswaralainnya, Penulis berkesempatan mengikuti kursus *Curriculum Design and Assessment for Education Innovation* di Netherlands. Ini merupakan *tailor made training* yang dirancang sesuai dengan kebutuhan BPPK. Dalam program selama 3 minggu tersebut, Penulis tidak sekedar memperoleh tambahan materi dari *Vrije Universiteit (VU) Amsterdam* terkait desain kurikulum, TNA, *active learning* maupun *assessment* atas program diklat, akan tetapi jugaberkesempatan mempelajari apa yang dilakukan oleh *Rijksacademie (National Academy for Finance and Economics - NAFE)* dan CPDC (*The Centre for Professional Development and Communication*). NAFE dan CPDC merupakan insitusi dibawah Kementerian Keuangan Belanda. NAFE menyelenggarakan berbagai diklat terkait sisi pengeluaran negara, yaitu di bidang Keuangan Publik, Audit

dan Ekonomi, sedangkan CPDC menyelenggarakan diklat terkait sisi penerimaan negara, yaitu pajak dan bea cukai.

Suatu program diklat yang bermanfaat untuk peningkatan kompetensi peserta, dimulai dari adanya analisis kebutuhan diklat. Dari hasil analisis kebutuhan diklat, dirancanglah kurikulum untuk menutupi kesenjangan kompetensi yang dimiliki pada suatu pekerjaan. Selanjutnya setelah disusun kurikulum, dipersiapkan materi yang akan diberikan pada program diklat. Proses pembelajaran di kelas merupakan sesuatu yang menentukan apakah diklat tersebut memberikan manfaat untuk peningkatan kompetensi peserta. Bisa saja materi yang diberikan sudah lengkap, akan tetapi dalam proses pembelajaran tidak menarik, misalnya hanya berisi ceramahsehingga hasil yang diperoleh dari diklat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Apa yang penulis alami dalam proses pembelajaran di VU, merupakan



resep, majalah, dst). Ada orang yang belajar dengan **mempraktikkan**. Setelah mencoba, dia belajar, untuk memperoleh daging yang tidak alot membutuhkan waktu pemasakan yang lebih lama, api yang tidak terlalu besar dst. Ada orang yang belajar dengan **melihat** apa yang dilakukan oleh orang lain dan **membandingkan** dengan apa yang selama ini ia lakukan, melakukan modifikasi atas apa yang menurutnya kurang, dan tetap mempertahankan apa yang menurutnya harus dipertahankan. Jadi belajar bukan-

difokuskan hanya mendengarkan informasi dari pengajar. Faktor terpenting yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah seberapa jauh pemahaman yang dimiliki oleh seorang peserta.

Selama kursus yang dilaksanakan di VU, tidak ada satu pun pengajar yang hanya memberikan ceramah **dalam menyampaikan materi**, dan peserta hanya mendengarkan saja. Kursus berlangsung dari jam 09.00-17.00 (cukup lama untuk ukuran Belanda, dengan 3 kali istirahat seperti halnya diklat yang diselenggarakan di BPPK). **Selama kursus berlangsung, peserta betul-betul dilibatkan dalam seluruh proses pembelajaran**, sehingga peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru dari pengajar, akan tetapi mendapatkan informasi tambahan dari pengalaman peserta yang lain, dan mendapatkan masukan atas apa yang telah dikerjakan untuk setiap penugasan yang diberikan. Hal ini didukung oleh persiapan yang baik dari VU, dimana sebelum berangkat ke Belanda, peserta diminta membawa seperangkat kurikulum dan GBPP yang ada di pusdiklat masing-masing, berikut alat evaluasi yang digunakan dalam diklat.

Beberapa hal yang menarik yang penulis peroleh terkait dengan *active learning*:

1. Adanya eksplorasi atas pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta. Pengajar menyadari bahwa pengetahuan serta pengalaman setiap peserta (terkait TNA, *active learning* dan *assessment*) tidaklah sama. Contohnya, peserta yang berasal dari Balai Diklat Keuangan (dan tentunya tidak terkait dengan proses TNA) tentu memiliki pengetahuan serta pemahaman yang berbeda dengan peserta yang berasal dari Pusdiklat (yang terlibat dengan proses TNA). Ini tentu bisa dilakukan pada diklat yang diselenggarakan oleh BPPK. Dalam setiap diklat, tentunya peserta memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda. Penting bagi pengajar untuk menggali seberapa jauh tingkat pemahaman peserta, sehingga dapat merumuskan apa yang harus dilakukan, apakah metode pembelajaran yang sebelumnya telah direncanakan dapat

“Suatu pembahasan, selalu dikaitkan dengan materi sebelumnya, bagaimana pemahaman peserta terkait topik tersebut, dan menggali lebih dalam pemahaman peserta.”

sesuatu yang menarik karena ada beberapa hal yang Penulis pikir dapat diterapkan dalam pelaksanaan diklat di BPPK. Misalnya saja **Active learning**. Model pembelajaran ini merupakan teknik-teknik pembelajaran dimana peserta tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengajar, tetapi melakukan sesuatu seperti mencerna informasi baru, memproses informasi yang mereka terima serta menerapkan apa yang mereka peroleh. *Active learning* lahir dari asumsi bahwa pembelajaran itu merupakan sesuatu yang dilakukan manusia dan setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Ada orang yang belajar secara mandiri, **menggali** informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu hal secara mandiri, ada orang yang belajar dengan melakukan sesuatu. Misalnya, seorang yang belajar memasak rendang dan ingin memasak rendang yang dagingnya tidak alot, rasanya tidak terlalu pedas dan tidak terlalu berair seperti gulai, bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang resep rendang yang baik, yang pas dengan kebutuhannya dari berbagai sumber (internet, buku

- memenuhi harapan dari peserta.
- Memperkenalkan konsep-konsep mendasar. Pengembangan dari setiap konsep ini dilakukan dengan diskusi, tugas kelompok dengan menggunakan kurikulum yang sudah dimiliki oleh BPPK (misalnya General English, Tax Auditor, Dog Handling, Internal Auditor). Dalam proses pembelajaran, materi tetap merupakan sesuatu yang penting, sehingga pengajar/fasilitator tetap harus memberikan materi terkait konsep-konsep mendasar. Misalnya, pada saat pengajar memberikan materi terkait kompetensi, selanjutnya pengajar membagi peserta dalam kelompok, dan setiap kelompok diminta memberikan 1 contoh diklat, dengan menyebutkan **tujuan** dari penyelenggaraan diklat dan kompetensi yang **akan dicapai** dari diklat tersebut. Selanjutnya setiap kelompok menuliskan pada *flip chart*, dan ditempel sehingga hasil yang dibuat oleh setiap kelompok dapat dilihat oleh kelompok yang lain. Pengajar meminta masukan dari peserta terkait hasil setiap kelompok, dan kemudian memberikan input kepada setiap kelompok.
 - Setiap kali pengajar memulai suatu pembahasan, selalu dikaitkan dengan materi sebelumnya, bagaimana pemahaman peserta terkait topik tersebut, dan menggali lebih dalam pemahaman peserta. Tujuannya adalah untuk menggali kembali apa yang telah diperoleh peserta dari materi sebelumnya, dan mengetahui apa yang diharapkan peserta dari materi yang akan diberikan. Caranya dengan meminta Peserta menuliskan pada kertas, dan menempelkan pada papan (metode ini dikenal dengan *one minute paper*). Contohnya, setelah hari sebelumnya dilakukan pembahasan seperti point 2, sebelum memulai menyampaikan materi, pengajar menanyakan apa yang diperoleh peserta dari pembelajaran sebelumnya, dan apa yang diharapkan. Dan pada akhir pembelajaran, Pengajar mengecek kembali untuk memastikan bahwa seluruh pertanyaan yang ditulis Peserta pada awal memulai sesi tersebut, sudah terjawab.
 - Diakhir setiap topik, dilakukan refleksi atas materi yang sudah diberikan, apa yang diperoleh peserta dan apakah hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik di lapangan, dan juga mengkaitkannya dengan materi yang akan diberikan pada sesi berikutnya. Lalu bagaimana upaya meningkatkan kualitas diklat yang dilaksanakan di BPPK? Dari apa yang Penulis rasakan sebagai peserta maupun pengajar, ada beberapa hal yang masih menyediakan



ruang perbaikan:

1. Rapat persiapan merupakan medium yang tepat untuk menekankan kembali apa tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan diklat. BPPK harus mengupayakan agar rapat ini dapat dihadiri oleh seluruh pengajar, sehingga tujuan tersebut dapat dikomunikasikan kembali dengan baik kepada seluruh pengajar. Jika ini dilakukan dengan optimal, maka kaitan antar setiap mata diklat yang ada pada diklat tersebut dapat dipastikan mengarah pada tujuan penyelenggaraan diklat yang ingin dicapai.
2. Satuan Acara Pengajaran (SAP), suatu rincian metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, dimaksudkan untuk menjamin adanya partisipasi aktif peserta dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti diklat. Dalam SAP
3. proses pembelajaran, yang tidak menutup kemungkinan munculnya proses pembelajaran yang hanya dilakukan dengan ceramah saja.
3. Perlu menekankan pentingnya dilakukan refleksi atas setiap materi yang telah diberikan, yaitu refleksi atas apa yang telah peserta peroleh dan apa manfaatnya di dunia kerja. Hal ini dapat menghindarkan adanya peserta yang hanya berpikir lulus ujian, tanpa ada dorongan untuk mengembangkan kompetensi ataupun meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Peserta seharusnya tidak dikondisikan untuk memandang bahwa setiap materi selesai, selanjutnya hanya perlu mempersiapkan diri untuk lulus ujian.
4. Saatnya mulai meningkatkan intensitas dalam melakukan penilaian kompetensi selama proses pembelajaran berlangsung. Hal

penilaian kompetensi, akan tetapi tugas yang diberikan selama diklat berlangsung menjadi cara bagi pengajar/fasilitator untuk dapat menilai kemampuan/keterampilan Peserta. Dengan demikian, penilaian atas kompetensi peserta diklat tidak semata-mata dengan ujian. Untuk itu, perlu dilakukan review atas beberapa diklat yang masih menggunakan ujian tertulis sebagai medium tunggal dalam menilai kompetensi peserta.

Mudah-mudahan apa yang diperoleh 'Tim 20' dari kursus selama 3 minggu, akan memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam *pilot project* di setiap Pusdiklat. Dan semoga metode *active learning* yang diterapkan selama pelaksanaan kursus dapat Penulis terapkan, sehingga tercipta diklat yang menyenangkan, sehingga tujuan diklat dapat tercapai, dan peserta kembali ke kantor dengan mengingat "betapa



yang disusun untuk setiap mata diklat, sebaiknya dicantumkan secara rinci aktivitas yang akan dilakukan terkait suatu topik tertentu, sehingga setiap pengajar tidak serta merta bebas melakukan modifikasi atas cara melakukan

ini dapat dimulai dengan peserta melakukan *self-assessment* pada awal dan akhir pelaksanaan diklat, untuk menilai peningkatan kompetensinya setelah mengikuti diklat. Saat ini, beberapa diklat di BPPK tidak lagi mensyaratkan ujian untuk

menyenangkan dan bermanfaatnya diklat di BPPK". ■

*Penulis adalah Widyaiswara
Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan*

Teknik Presentasi Unik!

20 detik x20 slide=6 menit 40 detik

Oleh: Rido Parulian Panjaitan

Pecha Kucha Night di Budapest: slide tanpa banyak tulisan. (gambar:www.pechakucha.hu)

Dalam sebuah konvensi, seorang professor India maju ke podium. Ia diberi waktu untuk berbicara selama 7 menit, begitulah kata moderator. Mendengar batasan waktu itu, sang professor tertawa lalu memulai presentasinya dengan berkata, " Ada 3 hal paling mustahil di India, menurut para mahasiswa saya di sana:

1. Berjalan di dinding dengan kaki telanjang
2. Mendapatkan ciuman dari wanita yang membencimu
3. Membuat professor berhenti berbicara!"

Mendengar itu, sang moderator hanya tersenyum. Matanya tetap mengarah kepada lembaran-lembaran kertas di hadapannya. Entah apa arti senyum dan anggukan itu.

Namun benar juga, berapa kali kita harus terjebak dalam situasi harus mendengarkan presentasi yang membosankan. Cita-cita kita pada saat seperti itu hanya satu, keluar dari ruangan.

Untungnya, saat ini sedang berkembang sebuah komunitas yang mengkhususkan diri menggunakan sebuah metode presentasi yang menarik dan unik . Tujuan teknik itu adalah membuat presentasi yang efektif sekaligus efisien. Bayangkan apabila kita harus mempresentasikan hal baru kepada para *executive board* atau eselon II! Mereka tak punya banyak waktu untuk mendengarkan presentasi yang berbelit-belit. *Dus*,diperlukan sebuah presentasi yang padat, singkat, informatif namun menarik.

Akhirnya, merebaklah metode presentasi sederhana namun unik ini ke seluruh dunia. Nama metode presentasi yang dahsyat itu adalah: *Pecha Kucha!*

Sejarah Lahir

Metode unik ini berawal dari dua orang arsitek yang bekerja di Jepang, Astrid Klein dan Mark Dytham. Sebagai arsitek, mereka harus melakukan banyak presentasi tentang ide-ide mereka. Pada akhirnya mereka sadar, ketika berpresentasi, mereka tak bisa berhenti

berbicara!

Maka mereka mulai membuat aturan untuk diri mereka sendiri saat presentasi. Setiap kali presentasi mereka hanya boleh menampilkan 20 slide (tayangan) power point. Setiap tayangan hanya berdurasi 20 detik. Secara otomatis, setelah 20 detik berlalu maka tampilan akan berubah ke slide berikutnya. Jadi presenter hanya dapat berbicara selama 20 detik saja setiap slidanya. Tak ada waktu bagi presenter untuk berpanjang lebar, sebab slide yang otomatis bertransisi itu akan memaksanya untuk "keep on track".

Aturan main

Secara garis besar beginilah peraturan dalam melakukan presentasi *pecha kucha*:

1. Presenter hanya diperkenankan menampilkan sebanyak 20 slide
2. Setiap slide, presenter diwajibkan berbicara selama 20 detik.
3. Haram hukumnya meletakkan banyak tulisan dalam slide. Apalagi sampai satu paragraph.

4. Sedikit tulisan, lebih banyak gambar yang relevan dalam slide.
5. Presenter diharuskan menjadi kreatif
6. Kreatif
7. Sekali lagi, kreatif!

Pengalaman Mereka

Jika anda menganggap metode ini masih kelas *ecek-ecek*. Mari kita lihat pengalaman tokoh yang sudah mencoba, Yoris Sebastian. Yoris sangat terkenal di Indonesia karena predikatnya sebagai *General Manager*(GM) termuda se-Asia dan termuda kedua di dunia. Bagaimana tidak, pada usia 26 tahun ia sudah menjabat sebagai GM pada Hard Rock Café Indonesia. Sekarang ia sudah mendirikan perusahaannya sendiri yaitu perusahaan konsultan kreatif OMG (*Oh My Goodness*).

Beginilah Yoris Sebastian berbagi pengalamannya saat menggunakan teknik *pecha kucha*:

"*It was an amazing feeling...!!!*Saya sudah sering membawakan presentasi dimana-mana namun untuk *Pecha Kucha* memang beda. Kadang 20 detik terasa begitu cepat dan kadang 20 detik terasa begitu lambat. Begitulah

yang saya rasakan saat mempersiapkan 20 slide saya untuk *Pecha Kucha* Surabaya..." - <http://yorissebastian.com>

Persiapan Teknis/Alat yang dibutuhkan

Alat yang digunakan pun tak macam-macam hanyalah aplikasi Microsoft Power Point. Pada aplikasi tersebut kita hanya tinggal mengubah *setting* pada tampilan *slide show* sehingga membuat slide saat ditampilkan dapat secara otomatis bergeser ke slide berikutnya secara otomatis setiap 20 detik, tanpa harus "di-click".

Tips Presentasi Saat Persiapan Presentasi

Berceritalah

Hindari hanya menjelaskan apa yang ada di tayangan/*slide* saja. Tapi berceritalah, seperti saat kita *ngobrol*. Bukan pidato.

Tampilan di Slide: seminimal mungkin kata, sebanyak mungkin gambar yang relevan.

20 detik/slide adalah singkat. Jadi, pastikan audiens menggunakan 20 detik

itu dengan efektif: Melihat visualisasi gambar, kata kunci, dan penjelasan anda. Jadi tak ada lagi kalimat panjang dalam slide. Apalagi paragraph. Hanya gambar(ilustrasi, tabel/grafik/flowchart sederhana) dan kata kunci.

Pecha Kucha Night di Budapest: *slide* tanpa banyak tulisan. (gambar:www.pechakucha.hu)

Berlatihlah

Jangan anggap enteng. Semakin sering anda presentasi secara konvensional maka disarankan semakin sering anda berlatih untuk metode *pecha kucha* sebabsemakin semakin sulit kita untuk berubah. Jadi, butuh lebih banyak berlatih. 6 jam adalah durasi latihan yang bagus, lalu dipecah-pecah dalam beberapa hari.

Kreatif

Inilah poin kunci melakukan presentasi ini. Anda harus berpikir keluar dari persepsi anda selama ini. *Thinking out of the box*. Cara yang cukup ampuh untuk memulai adalah, banyak berselancar di internet untuk mencari ide-ide baru presentasi yang kreatif.



Pecha Kucha: ペチャクチャ,
[pe^hca k^u t^{ca}] alias *chit-chat* (*ngobrol*)





Contoh slide kreatif untuk menjelaskan 4 unsur kreativitas(gambar:www.architectonist.blogspot.com)

Saat Presentasi

Perkenalan

Saat akan memulai, jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan menyatakan hal yang akan anda presentasikan, dalam hitungan detik.

Mulai Bicara

- Gunakan intonasi suara seperti anda sedang ngobrol, bukan pidato.
- Pastikan suara anda dapat didengar semua orang dengan jelas
- Jika anda menggunakan mic, pastikan suara nafas anda tidak masuk ke dalam mikrofon.
- Jangan terlihat terburu-buru
- Pastikan presentasi anda mengalir, oleh karena itu urutan slide haruslah sistematis.

Sajikan Saripatinya saja

Jangan terpancing untuk menyampaikan seluruh informasi saat presentasi tersebut. Simpan hal-hal penting yang lebih detil untuk anda jelaskan pada sesi Tanya jawab. Oleh karena itu, tampilkanlah hal-hal terpenting dan yang memancing keingintahuan dan menimbulkan pertanyaan pada audiens saat presentasi, tanpa harus

menjelaskan secara detail.

Dahsyatnya, dengan menggunakan metode ini energi anda tidak terkuras untuk menjelaskan semua hal yang belum tentu dibutuhkan, artinya anda berhasil melakukan seleksi informasi: hanya menjelaskan informasi yang menarik perhatian dan dibutuhkan oleh audiens. Hemat waktu dan energi.

Body Language

Sikap tubuh itu penting. Senyumlah,

pandanglah mata audiens. Berbicaralah ke semua orang.

Amati Audiens

Jaga momentum 6 menit 40 detik itu. Pastikan audiens tetap terjaga dan mengikuti selama waktu itu.

Sedikit Saran

Terakhir, jika anda berada dekat computer atau *gadget* lainnya yang terkoneksi dengan internet saat membaca majalah ini, ketikkanlah kata kunci "Pecha Kucha" di Google. Dalam hitungan detik anda akan dibanjiri oleh informasi menarik lainnya tentang Pecha Kucha. Selamat berselancar! Selamat mencoba! ■

Sumber:

- Wikipedia
- <http://aworks.com/en/blog/2007/07/03/pecha-kucha-nights-guide-to-better-presentations-skills/>
- <http://helarfest.com/2009/pecha-kucha-night-7-penuh-warna/>
- <http://yorissebastian.com>
- <http://architectonist.blogspot.com>
- <http://pechakucha.hu>
- <http://iboughtashelter.com>

Penulis adalah Kasubbag Tata Laksana pada Sekretariat BPPK



Artikel ini paling enak dibaca pada suatu senja sambil menyeruput segelas kopi panas, sebab isinya tidaklah berat namun bermanfaat, semoga.



Hangatnya Diklat di Negeri Kincir Angin

Oleh : Rido Parulian Panjaitan*

Dalam sebuah kesempatan yang langka, penulis meluncur ke negeri Belanda untuk berguru tentang penyelenggaraan diklat. Berduapuluh kami belajar di *Vrije Universiteit* (Amsterdam) dan *Rijksakademie* (Den Haag) sana.

Diklat a la Belanda

Ada hal kecil yang menarik buat saya. Para penyelenggara diklat di *Vrije Universiteit* ternyata jauh lebih hangat dalam menyelenggarakan diklat. Kalau isi materi pada diklat tersebut tak usahlah saya bahas dalam artikel ini. Kali ini, cukuplah kita bicara tentang kehangatan mereka itu.

Pembukaan Diklat

Alih-alih membuka diklat dengan acara seremonial, *Vrije Universiteit* lebih

memilih pendekatan informal. Setiap orang duduk pada kursi (tanpa meja) dalam sebuah lingkaran. Di dalamnya duduk juga presiden *CIS Vrije Universiteit*. Bentuk, warna dan tinggi kursi yang diduduki sang presiden pun tak berbeda dengan kursi lainnya yang kami duduki.

Selanjutnya kami diminta untuk berpasang-pasangan dan memperkenalkan pasangan kita tersebut kepada seluruh audiens. Bukan konsep yang baru memang. Namun bedanya, sang presiden, staff dan para pengajar pun turut terlibat dalam proses berpasangan dan memperkenalkan diri itu. Keramahan terpancar dari wajah mereka. Saat itu, seolah-olah jiwa kami sudah terbuai dibeli oleh kehangatan yang mereka tawarkan.

Lain *Vrije Universiteit*, lain pula

Rijksakademie. Sekedar menjelaskan, *Rijksakademie* adalah akademi diklat di bawah Kementerian Keuangan negeri Belanda yang memiliki fokus pada bidang *expenditure*, singkatnya tugas dan fungsinya mirip dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan di BPPK. Kami berkesempatan untuk melakukan studi banding di sana selama 3 hari.

Nah, marikembali ke masalah penyambutan a la *Rijksakademie* tadi. Ketika kami baru saja membuka pintu dan hendak melangkah masuk dari trotoar jalan ke dalam gedung *Rijksakademie*, kami terkejut karena di dalamnya sekelompok orang banyak tersenyum. Tiba-tiba orang yang berdiri di paling depan menyalami kami, "Hi.. Welcome in *Rijksakademie*" Ujarnya. Ternyata ia adalah salah satu petinggi *Rijksakademie* dengan para staafnya



yang memang segaja berdiri di sana untuk menyambut kami. Hmm..*boleh juga*. Peserta diklat sudah disambut hangat sejak dari pintu masuk.

Walaupun acara pembukaan diklat tidak dikemas dalam acara serimonial yang formal, namun tak sedikit pun kami merasa dilecehkan seperti pemikiran beberapa orang yang merasa bahwa keformalan adalah bentuk mutlak dari penghormatan. Kami justru merasakan sebaliknya, kehangatan informal yang mereka tawarkan, yang tidak dipoles dalam sebuah protokol seremonial, justru membuat kami merasa lebih

dihargai, dan lebih terkesan tulus. Sirna sudah dendam masa lalu, mengingat fakta bahwa mereka dulu pernah menjajah kita 350 tahun lamanya.

Selama Diklat

Kehangatan dan kesantiaian mereka tidak hanya berakhir di awal diklat. Selama diklat berlangsung kami juga dibuai dengan suasana santai dan ramahnya para pengajar. Di *Vrije Universiteit*, para pengajar dengan ramah menyampaikan materinya sambil dengan apresiatif mendengarkan setiap opini dan masukan. Mereka

pintar menciptakan suasana rileks dan memancing setiap orang untuk berpartisipasi, meskipun di awal diklat mereka terlihat berusaha mencari cara untuk memahami kami secara personal.

Pengajar pada minggu berikutnya, telah bertanya pada pengajar di hari pertama mengenai kami. Pengajar itu ingin benar-benar mengenali tentang kami, sejauh mana level pengetahuan kami mengenai topik yang akan diajarkan, apa *background* lingkungan kerja kami, dan pertanyaan lainnya yang menurutnya relevan untuk memperkaya persiapan mengajar. Mereka sudah bertanya jauh hari sebelum mereka mengajar. Sehingga ketika pengajar itu masuk, ia mengajar lebih efisien dan dapat langsung *"tune-in"* dengan kami sebagai peserta diklat.

Nah kalau di *Rijksakademie*, pendekatanannya sangat bersifat personal. Begitu mereka paham bahwa kami dari Indonesia, maka mereka memutuskan untuk menyediakan *catering* makanan Indonesia khusus buat kami untuk makan siang.

Ruangan kelas pun tak luput dari sentuhan personal mereka. Pada hari pertama, ruangan kelas kami sebenarnya adalah ruangan kelas yang sudah representatif untuk belajar. Namun pada hari kedua, tiba-tiba saja kelas tersebut



sudah disulap dengan berbagai hiasan tulip disebar di sana sini. Foto kincir angin dan foto khas Belanda lainnya langsung dipajang memenuhi ruangan.

Tampaknya mereka sadar bahwa sebagian besar dari kami baru pertama kali ke Belanda, maka mereka membuat sentuhan personal di ruangan kelas dengan harapan kami akan merasa bahwa kami adalah turis yang sedang berlibur, bukan hanya belajar. Mereka tak puas dengan fakta bahwa ruangan mereka sudah cukup baik, sebaliknya mereka terus berinovasi melalui sentuhan personal tadi.

Berpakaian

Jika diklat di sana, maka tidak ada keharusan berpakaian seragam. Pakai kaos oblong, tak masalah. Pakai kemeja rapi pun, *ok ok* saja. Hal itu pun tak terkecuali buat pengajar. Terkesan sepele tapi dampaknya cukup dalam. Kebebasan berpakaian itu memunculkan kenyamanan bagi peserta diklat. Bukankah setiap orang memilih untuk merasa nyaman?!

Faktanya, ketika kami sebagai peserta diklat di sana, tak semata-mata kami lalu berpakaian seenaknya. Setiap orang tetap berpakaian pantas. Kebebasan yang diberikan justru membuat kami, yang juga adalah pegawai BPPK ini, merasa harus bertanggung jawab.

Lalu saya membayangkan, jika saja kebebasan berpakaian selama diklat itu diterapkan di BPPK maka hilanglah ritual peserta diklat yang biasanya sehari sebelum diklat harus *susah-susah* pergi ke toko untuk membeli kemeja putih, membongkar lemari untuk mencari stok kemeja putih atau bahkan meminjam dari teman hanya demi mengikuti diklat.

Memang untuk beberapa diklat seperti Prajabatan, keseragaman pakaian itu masih relevan. Namun, mungkin untuk beberapa diklat kita lainnya

sebaiknya peserta diklat dibebaskan saja berpakaian, sepanjang sopan.

Sejatinya, cara orang berbusana adalah salah satu cara mengekspresikan diri. Kegagalan berekspresi dapat pula berarti kealfaan dari rasa nyaman. Jika alasan dibalik peraturan seragam itu adalah agar antara pihak penyelenggara diklat dan peserta diklat lebih mudah dibedakan, maka pembedaan itu sendiri



sudah menjadi bentuk awal diskriminasi negatif atas kehadiran peserta diklat. Seolah menekankan bahwa mereka hanyalah berstatus sebagai tamu dan tak berhak menganggap BPPK seperti rumahnya sendiri. Bagaimana tidak, berpakaian saja mereka harus diatur dan dibeda-bedakan.

Prinsip Adult Learning

Hmm saya sempat bertanya-tanya, mungkin kehangatan yang kami rasakan selama diklat di Belanda hanyalah bersifat kasus per kasus sehingga tak usahlah terlalu diambil pusing dan coba diterapkan di Indonesia karena

dampaknya belum tentu sama. Untuk meyakinkan diri, maka saya mencoba mencari tulisan ilmiah yang membahas hal tersebut.

Menurut Diane D. Galbraith dan Sandra E. Fouch dalam tulisannya *Principles of Adult Learning*, ada beberapa prinsip dalam pola pembelajaran untuk orang dewasa (*Adult learner-andragogy*) yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. Analisa Kebutuhan (*Needs Assessment*). Desain diklat yang diselenggarakan haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta.
2. Keamanan (*safety*). Peserta diklat harus merasa aman dengan diklat tersebut. Pengajar, Kurikulum, dan materi harus dapat dipercaya. Opini peserta diklat di dalam kelas harus diapresiasi.
3. Hubungan Baik (*Sound Relationship*). Hubungan baik harus diciptakan untuk membangun rasa keingintahuan dan ketertarikan peserta akan diklat yang akan diselenggarakan. Prinsip ini tidak hanya mengenai bahwa pengajar dan panitia diklat harus menjaga kesopanan dan hubungan profesional dengan peserta diklat. Prinsip ini lebih jauh menekankan bahwa *adult learners* sangat senang jika dalam sebuah diklat tercakup 3 aspek, yaitu: Melibatkan pikiran, **emosi**, dan aksi. Keterlibatan ketiga aspek itu secara berturut-turut akan mengurangi rasa canggung dan ketidaknyamanan peserta diklat yang sedang berada di lingkungan baru.
4. Aksi dengan Refleksi. Setiap kali peserta diklat diminta melakukan sesuatu maka harus ada proses evaluasi untuk menilai aksi yang sudah dilakukan.
5. Materi yang dibawakan sebaiknya tidak seluruh konsep utuh melainkan hanya sebagian konsep yang dibuat lebih detail dan

memungkinkan peserta menjadi ahli pada bagian detil itu (bite-size chunks).

6. Kerjasama (*Teamwork*). Setiap peserta diklat diajak berada dalam suatu/beberapa tim.
7. Keterlibatan (*Engagement*). Peserta diklat dilibatkan aktif dalam proses diklat.
8. Dapat Dipertanggungjawabkan (*Accountability*). Semua proses diklat yang dilakukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan bahwa hasilnya akan bermanfaat buat peserta diklat.

Marilah kita hanya menyoroti poin 3 yang menurut saya cukup menarik, yaitu hubungan baik. Di dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwa salah satu aspek penting selain keterlibatan pikiran dan praktek (aksi) ada satu aspek penting lainnya yang diperlukan, yaitu: **keterlibatan emosi**.

Saya pun belajar hal baru bahwa segala bentuk kehangatan, kesantiaian yang dilakukan oleh *Vrije Universiteit* dan *Rijksakademie* bukanlah suatu kebetulan atau kejadian kasus per kasus melainkan suatu tindakan yang fundamental dalam pembelajaran orang dewasa (*Adult Learning*) dan memiliki

landasan ilmiah di dalamnya. **Sehingga melayani peserta diklat dengan melibatkan unsur emosi (contoh: kenyamanan, keramahan, kehangatan, merasa dihargai, dan merasa diterima) menjadi suatu hal yang substantial dalam mendidik orang dewasa**. Fantastiknya, upaya memunculkan keterlibatan emosi itu **tak harus selalu melibatkan anggaran yang besar**, seperti yang telah dicontohkan *Vrije Universiteit* dan *Rijksacademie*.

Kesimpulan

Mungkin sudah saatnya diklat-diklat kita lebih dibubuhi sentuhan-sentuhan personal. Biarkan peserta diklat merasa bahwa ketika mereka pergi dari runtitas kantor ke dunia diklat, maka mereka merasa seperti pulang ke rumah. Saya teringat satu kalimat yang diucapkan seorang pengajar di *Rijksakademie* "We want to make people feel like home in Rijksakademie"

Kita dapat memulai dengan cara: **berusaha lebih peka**. Sudah saatnya kita membuka semua indra kita agar lebih sensitif lagi dalam melihat peserta diklat. Dengan demikian, kita sendiri dapat menganggap bahwa mereka

adalah sepupu kita yang baru saja pulang ke kampung halaman setelah lama merantau. Seketika itu, kita pun tahu bagaimana caramemperlakukan mereka, sama seperti kita memperlakukan seorang saudara dekat yang sudah lama tak berjumpa.

Semoga ketika peserta diklat hadir, mereka merasakan sambutan hangat khas BPPK. Sehingga ketika mereka harus kembali lagi ke rutinitas kantornya, makalangkahnya akan jauh lebih ringan namun tetap menolehkan kepala ke belakang dan berkata: Sebentar lagi, aku akan kembali pulang ke sini, sepupuku.. Dalam *rendezvous* berikutnya. Tunggalah!

Pada momen seperti itu, kita pun bisa tersenyum sambil mengangguk dengan mata berbinar yang seolah berucap: Kutunggu kau datang lagi, sepupu. Lalu ketika sosoknya telah hilang dari pandangan, kita dapat berjabat tangan ke sesama anggota keluarga BPPK lainnya dan berkata: Benar, BPPK telah menjadi rumah buat mereka. ■

Penulis adalah Kasubbag Tatalaksana, Sekretariat BPPK



Geliat Pusdiklat Pajak Demi Suksesnya Desentralisasi BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan

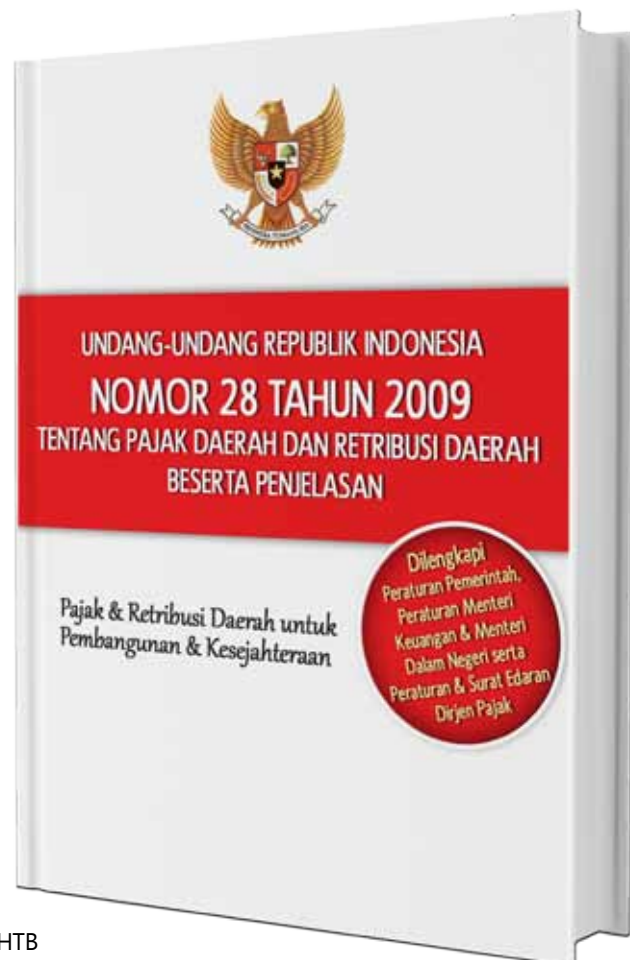
Oleh: Rahadi Nugroho

Ada yang berbeda pada rutinitas Pusdiklat Pajak di paruh kedua tahun 2010 lalu. Diklat Dasar PBB dan BPHTB berbasis e-learning mengisi kesibukan semua pegawai Pusdiklat Pajak saat itu. Hari-hari diwarnai dengan konversi modul, pembuatan fitur-fitur pada situs e-learning, pembuatan aplikasi ujian, kelas-kelas virtual dan konfirmasi keikutsertaan peserta. Diklat Dasar PBB dan BPHTB berbasis e-learning sendiri berlangsung dari tanggal 25 Oktober s.d. 3 Desember 2010 diikuti oleh 1.513 pegawai dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Keantusiasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Diklat Dasar PBB dan BPHTB berbasis e-learning tergambar dari banyaknya pemerintah daerah yang mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat ini. Tercatat lebih dari 200 pemerintah kabupaten/kota dan propinsi mengikutsertakan pegawainya dalam diklat ini. Begitu juga para pegawai pemerintah daerah tidak kalah antusiasnya, ramainya kegiatan forum diskusi menggambarkan keantusiasan mereka. Bahkan sampai dengan Bulan Maret 2011, beberapa peserta masih aktif berbincang di

forum diskusi. Ujianpun demikian, dari 1.513 peserta terdaftar 1.141 atau 75,41% peserta mengikuti ujian. Sistem ujian yang terkomputerisasi dan kelulusan yang dapat diketahui langsung ketika peserta selesai mengerjakan ujian menambah keceriaan pada diklat tersebut.

Kegiatan e-learning tersebut merupakan salah satu upaya Pusdiklat Pajak menyukseskan program desentralisasi BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Dengan metode ini, ilmu tentang BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat menjangkau semua wilayah Republik Indonesia dengan biaya yang relatif murah. Pendaftaran peserta dilakukan secara *on-line*. Setelah terdaftar, peserta dapat mengunduh materi ataupun mengikuti pembelajaran *on-line* yang disusun dengan sangat atraktif. Dengan demikian, peserta dapat mempelajari materi PBB dan BPHTB





kapan pun dan dimana pun selama memiliki akses internet. Selain itu, peserta dapat mengikuti kelas-kelas virtual dengan jadwal tertentu. Dalam kelas-kelas virtual peserta dapat menanyakan kepada narasumber berbagai macam hal tentang materi yang sedang dibahas. Menyadari bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet maka Pusdiklat Pajak juga mengirimkan materi pembelajaran dalam bentuk compact disk (CD) sehingga peserta dari daerah yang tidak memiliki akses internet tetap dapat mempelajari materi diklat ini. Dengan berbagai kemudahan tersebut Pusdiklat Pajak menargetkan 4-5 pegawai setiap pemerintah daerah mengikuti program diklat dasar PBB dan BPHTB berbasis e-learning ini. Dengan jumlah pemerintah daerah yang mencapai 500 maka target peserta program diklat ini mencapai 2.000 orang.

Sebelum menyelenggarakan Diklat Dasar PBB dan BPHTB berbasis e-learning Pusdiklat Pajak telah merealisasikan diklat Dasar PBB dan Dasar BPHTB yang dikhususkan untuk pegawai pemerintah daerah secara klasikal. Diklat tersebut dilaksanakan di Jakarta dan Balai-Balai Diklat Keuangan. Sama dengan Diklat berbasis e-learning, tujuan diklat yan dilakukan secara klasikal adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di pemerintah kabupaten/kota menyongsong desentralisasi BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2010.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi kelancaran proses penyerahan tersebut. Kesuksesan program desentralisasi BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak saja ditentukan oleh adanya peraturan tentang BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD tetapi juga infrastruktur dan sumber daya manusia. Maka tidak heran jika sosialisasi dan seminar tentang penyerahan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan marak diselenggarakan

baik oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan maupun Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagaimana setelah kegiatan e-learning PBB dan BPHTB? Komitmen Pusdiklat Pajak untuk menyukseskan program pendaerahan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan terus berlanjut. Beberapa pemerintah daerah bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak menyelenggarakan diklat maupun bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas pegawai mereka dalam BPHTB dan PBB demi suksesnya program desentralisasi. Beberapa bulan yang lalu misalnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak menyelenggarakan Bimbingan Teknis PBB. Dalam bimbingan teknis tersebut diberikan materi penilaian tanah dan bangunan sekaligus dengan praktek di lapangan tentang penilaian tanah dan bangunan.

Semoga dengan program-program yang dibangun Pusdiklat Pajak bekerja sama dengan Pemerintah daerah program pendesentralisasian PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat terwujud dengan baik. ■

Penulis adalah Kasubbid Program pada Pusdiklat Pajak





KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS (KKDK) PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Oleh: Rahmad Gendro Legowo

Dalam rangka mendukung pemerintah daerah meningkatkan kapasitas aparatnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan kegiatan Latihan Keuangan Daerah (LKD), Kursus Keuangan Daerah (KKD), dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Pentasahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) sejak tahun anggaran 1981/1982 (LKD), 1985/1986 (KKD), dan 2007 (KKDK). Kegiatan LKD dan KKD sempat diberhentikan sementara pada tahun 2001-2003.

Secara umum, tujuan dilaksanakannya LKD, KKD, dan KKDK adalah untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejak tahun 2009 Lembaga Pengembangan Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (LPMAN STAN) telah dipercaya untuk menjadi center penyelenggara Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Pentasahaan/Akuntansi Keuangan Daerah yang secara khusus mempunyai tujuan Menghasilkan peserta yang memiliki keterampilan di bidang penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Pada 2009 dan 2010 LPMAN STAN telah menyelenggarakan 8 (delapan) angkatan kegiatan tersebut yang masing-masing tahun sebanyak 4 (empat)

angkatan dengan total peserta sebanyak 295 peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan pada tahun 2011 ini diberikan kepercayaan lagi untuk menyelenggarakan 4 (empat) angkatan dan telah dilaksanakan 2 (dua) angkatan yang diikuti sebanyak 83 peserta pada tanggal 20 Juni s.d. 23 Juli 2011 di Puri Avia Cipayung Bogor. Keterangan tersebut dapat dilihat pada tabe.

Dalam proses belajar-mengajar, pengajar memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan KKDK, maka dibutuhkan adanya pengajar yang berkualitas, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Pembekalan terhadap pengajar dilakukan melalui *Training of Trainers* (ToT), baik mengenai substansi materi maupun metode pengajaran partisipatif.

Selain itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran kursus tersebut tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan studi banding. Untuk angkatan I dan II tahun 2011 ini peserta kursus diajak melakukan studi banding ke Kotamadya Bandung yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Tujuan yang lebih khusus dari pelaksanaan studi banding dalam KKD dan KKDK adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat dan menerjemahkan penerapan materi yang

didapat selama kursus.

2. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat, membandingkan, dan mengimplementasikan *best practice* yang didapat pada saat studi banding.
3. Melatih peserta untuk merumuskan permasalahan yang terdapat pada sisi kebijakan maupun implementasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Melatih peserta untuk membuat kajian makalah dengan merumuskan gambaran masalah dan pemecahan masalah dari kebijakan pengelolaan keuangan yang ada.

Selain tujuan sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan studi banding juga dapat memberikan penyegaran kepada peserta setelah mengikuti kursus secara intensif selama beberapa pekan. Melalui studi banding, hubungan peserta dengan pembimbing dan antarpeserta diharapkan dapat terjalin lebih erat, sehingga mendorong mereka untuk saling berkomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun sertifikat kelulusan ditan-datangi oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Keuangan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, dan ketua center bersangkutan. ■

Penulis adalah
Pelaksana pada STAN



Mengenal Nota Keuangan

Oleh: Agus Kuswanto

Tak kenal maka tak sayang, merupakan ungkapan yang sering kita dengar dan ada benarnya. Seperti Nota Keuangan, tidak semua dari kita mengetahui apa itu Nota Keuangan (NK). Padahal nota keuangan merupakan dokumen yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yang pengantarnya dibacakan oleh Presiden setiap tahun pada sidang Paripurna di DPR RI. Bahkan banyak ditunggu-tunggu oleh para pemangku kepentingan (stakeholder), mulai pengamat ekonomi, sampai pegawai negeri.

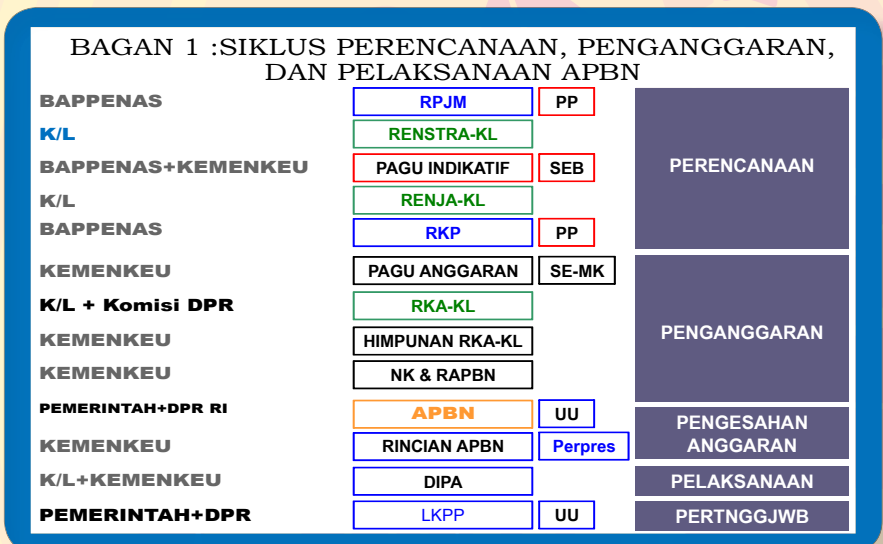
Apabila pengamat ekonomi ingin mengetahui apakah APBN bersifat ekspansi atau kontraksi dan pengaruhnya terhadap perekonomian, sedangkan pegawai negeri pada umumnya ingin mengetahui apakah akan ada kenaikan gaji tahun depan.

Pengertian NK

Pengertian Nota Keuangan secara harafiah adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nota Keuangan tersebut pada umumnya terdapat dua jenis,

yaitu Nota Keuangan untuk RAPBN dan Nota Keuangan untuk RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan). Perbedaan utama dari nota keuangan tersebut yaitu, pada Nota Keuangan RAPBN terdapat penjelasan tentang perkembangan realisasi APBN pada tahun yang lalu (pada umumnya 5 tahun) dan tahun berjalan, sedangkan pada RAPBN-P tidak ada; NK RAPBN disampaikan oleh Presiden, sedangkan NK RAPBN-P tidak.

Perbedaan lainnya yaitu, pada Nota Keuangan RAPBN menjelaskan



rencana APBN pada satu tahun yang akan datang, sedangkan pada Nota Keuangan RAPBN-P menjelaskan rencana usulan perubahan APBN sampai dengan akhir tahun berjalan, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II. Adapun yang dibahas dalam NK RAPBN maupun RAPBN-P tetap sama yaitu mengenai: (a) asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI, harga minyak, *lifting*; (b) pendapatan negara dan hibah, yang meliputi penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara

Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran

nonutang.

Untuk mengetahui secara komprehensif tentang posisi nota keuangan, maka dapat dilihat pada bagan 1, yang menggambarkan siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN. Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBN sudah dimulai dari awal tahun dengan adanya pagu indikatif, kemudian disusun renja K/L, pagu anggaran, dan seterusnya. Sedangkan penulisan Nota Keuangan mulai dilakukan pada bulan Juni, namun pada umumnya didahului dengan pembahasan *outline* Nota Keuangan mulai awal tahun juga.



bukan pajak. (c) belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja subsidi, pembayaran bunga utang, belanja hibah, belanja lain-lain.

Sedangkan transfer ke daerah yang meliputi dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). (d) pembiayaan anggaran, yang meliputi pembiayaan utang dan

Proses dan Unit yang bertanggung jawab dalam penyusunan nota keuangan

Proses dan unit yang menyusun Nota Keuangan dan RAPBN mengalami perkembangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada tahun

Tabel 1: Perbandingan Nota Keuangan dan UU/RUU APBN

No.	Uraian	TA 1977/1978	TA 1991/1992	TA 1996/1997	TA 2012
1	Jumlah Hal.	76	649	538	559
2	Jumlah Bab	IV	VI	V	VII
	Bab I : Umum Bab II : Jumlah Uang Beredar dan Perkreditan Bank Bab III : Perkembangan Neraca Pembayaran dan Lalu Lintas Devisa Bab IV : Perkiraan Pelaksanaan APBN 1977/1978	Bab I : Umum Bab II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab III : Moneter dan Perkreditan Bab IV : Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran Bab V : Keuangan Daerah Bab VI : Hasil-Hasil Pembangunan dan Produk Domestik Bruto	Bab I : Umum Bab II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab III : Moneter dan Perkreditan Bab IV : Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran Bab V : Keuangan Daerah	Bab I : Umum Bab II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab III : Moneter dan Perkreditan Bab IV : Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran Bab V : Keuangan Daerah	Bab I : Pendahuluan Bab II : Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2012 Bab III : Pendapatan Negara dan Hibah Bab IV : Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab V : Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab VI : Pembiayaan Defisit Anggaran dan Risiko Fiskal Bab VII : Pelaksanaan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Proyeksi APBN Jangka Menengah.
3	UU/RUU APBN	5 Pasal	8 Pasal	14 Pasal	45 Pasal

anggaran 1969/1970 penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dilakukan oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, dan mulai tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Pada tahun 1985, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dilakukan oleh unit setingkat eselon II, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Pada tahun 1987, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dilakukan oleh unit setingkat eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP). Hal tersebut disebabkan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran.

Pada tahun 1993, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dilakukan oleh Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM). Pada tahun 2000, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dilakukan oleh Badan Analisa Fiskal (BAF). Pada tahun 2004, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dilakukan oleh Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan. (<http://www.fiskal.depkeu.go.id>).

Pada tahun 2008, terjadi perubahan proses dan penulisan NK, dimana penulisan NK dibagi per bab serta dilakukan oleh unit penanggung jawab, sedangkan penggabungan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Demikian juga pada penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012, proses dan penyusunan NK dan RAPBN sama dengan tahun 2008.

Penanggung jawab Bab tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing eselon I, misalnya Bab masalah ekonomi makro, pendapatan, dan risiko fiskal, yang bertanggung jawab

Badan Kebijakan Fiskal; Bab tentang belanja yang bertanggung jawab Ditjen Anggaran, Bab tentang Transfer ke Daerah yang bertanggung jawab Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Bab tentang Pembiayaan Anggaran yang bertanggung jawab Ditjen Pengelolaan Utang, dengan didukung oleh Ditjen Anggaran.

Sedangkan proses penulisan NK mulai dilaksanakan pada minggu I Juni 2011 sampai dengan – minggu II Juli 2011. Sebelumnya, DJA menulis surat permohonan kepada unit eselon I terkait, untuk menyampaikan bahan penyusunan konsep draft NK dan RAPBN 2012. Selain itu, intern DJA menyusun draft NK dan RAPBN beserta RUU sesuai tugas dan fungsinya. Pada tanggal 15 Juli merupakan batas penyampaian draft finas NK RAPBN 2012 dari Unit Eselon I untuk penggabungan.

Kemudian DJA menggabung draft menjadi buku NK dan RUU RAPBN 2012 pada tanggal 8-20 Juli. Draft yang sudah digabung tersebut kemudian disampaikan kepada unit eselon I terkait untuk koreksi ulang dan penyempurnaan. Kemudian draft NK dan RUU APBN 2012 disampaikan ke Menteri Keuangan untuk koreksi, setelah itu dilakukan finalisasi. Kemudian NK dan RUU APBN tersebut dicetak dan dikirim ke DPR pada awal Agustus.

Tabel 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2011-2012

URAIAN	2011		2012
	APBN	APBN-P	RAPBN
- Pertumbuhan ekonomi (%), y-o-y	6,4	6,5	6,7
- Inflasi (%), y-o-y	5,3	5,65	5,3
- Suku bunga SPN 3 bulan (%) ¹⁾	6,5	5,6	6,5
- Nilai tukar (Rp/US\$1)	9.250	8.700	8.800
- Harga minyak (US\$/barel)	80,0	95,0	90,0
- Lifting (ribu barel per hari)	970	945	950

1) APBN 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan

Tabel 3: Ringkasan Postur RAPBN 2012 (triliun rupiah)

URAIAN	2011		2012		
	APBN	APBN-P	RAPBN	Selisih dgn APBN-P 2011	
				Nominal	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.104,9	1.169,9	1.292,9	123,0	10,5
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.101,2	1.165,3	1.292,1	126,8	10,9
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	850,3	878,7	1.019,3	140,6	16,0
<i>Tax Ratio (% thd PDB IHK)</i>	12,1	12,2	12,6	0,4	3,2
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	250,9	286,6	272,7	(13,8)	(4,8)
II. PENERIMAAN HIBAH	3,7	4,7	0,8	(3,8)	(82,3)
B. BELANJA NEGARA	1.229,6	1.320,8	1.418,5	97,7	7,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)	836,6	908,2	954,1	45,9	5,1
A. Belanja K/L	432,8	461,5	476,6	15,1	3,3
B. Belanja Non K/L	403,8	446,7	477,5	30,8	6,9
a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN	95,9	129,7	123,6	(6,1)	(4,7)
- Subsidi Listrik	40,7	65,6	45,0	(20,6)	(31,4)
II. TRANSFER KE DAERAH	393,0	412,5	464,4	51,9	12,6
1. Dana Perimbangan	334,3	347,5	394,1	46,6	13,4
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	58,7	65,0	70,2	5,3	8,1
Total Anggaran Pendidikan	249,0	266,9	286,6	19,6	7,4
% Thd Belanja Negara	20,2	20,2	20,2	(0,0)	(0,0)
C. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(124,7)	(150,8)	(125,6)	25,2	(16,7)
% Defisit Terhadap PDB - IHK	(1,8)	(2,1)	(1,5)	-	-
D. PEMBIAYAAN (I + II)	124,7	150,8	125,6	(25,2)	(16,7)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	125,3	153,6	125,9	(27,7)	(18,0)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(0,6)	(2,8)	(0,3)	2,5	(89,5)

*) termasuk subsidi PPN atas BBM bersubsidi yang dialihkan dari subsidi pajak pada pos subsidi energi

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan NK dan RAPBN adalah Pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu :

- APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ayat 1)
- RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Ayat 2)
- Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (Ayat 3)

Selain itu, dasar hukum yang lain adalah UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, terutama Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15; UU No. 2/2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, terutama pasal 155, Pasal 156, dan pasal 157; serta PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Fungsi Nota Keuangan (NK)

Sedangkan fungsi NK yang paling utama adalah menjelaskan dan menjabarkan RUU tentang APBN yang

disampaikan ke DPR RI, baik mengenai pelaksanaan tahun yang lalu maupun kegiatan tahun yang akan datang. Hal ini disebabkan dalam RUU tentang APBN tersebut tidak menjelaskan secara detil tentang kebijakan, serta kegiatan dan program Pemerintah.

Isi Nota Keuangan

Isi Nota Keuangan apabila dilihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa isi yang disampaikan kepada DPR RI mengalami perkembangan, apabila pada tahun 1977/1978 terdiri dari empat bab dan membahas jumlah uang beredar dan perkreditan, perkembangan neraca pembayaran dan lalu lintas devisa, serta perkiraan pelaksanaan APBN 1977/1978, maka pada tahun 2012 telah berubah dan lebih fokus membahas APBN, serta berkembang menjadi 7 bab, yaitu: Bab I membahas pendahuluan, Bab II membahas perkembangan ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2012, Bab III membahas pendapatan negara dan hibah, Bab IV membahas anggaran belanja pemerintah pusat, Bab V membahas kebijakan desentralisasi fiskal, Bab VI membahas pembiayaan defisit anggaran dan risiko fiskal, dan Bab VII membahas pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka

menengah, dan proyeksi APBN jangka menengah. Untuk selanjutnya, kami fokuskan penjelasan isi NK berdasarkan NK dan RAPBN tahun 2012, yang paling baru dan baru disampaikan Presiden pada sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2011 yang lalu.

Penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan membahas tentang prioritas RKP 2012, Peran strategis kebijakan fiskal, dasar hukum penyusunan NK dan APBN, asumsi dasar ekonomi makro 2012, pokok pokok kebijakan fiskal, dan uraian singkat isi masing-masing bab.

Dalam Bab II perkembangan ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2012, membahas lebih detil tentang: a) perkembangan ekonomi 2006-2010 dan proyeksi 2011, pada perekonomian dunia dan regional, serta perekonomian nasional. b) tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro 2012. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan keadaan perekonomian dunia dan regional serta perekonomian domestik, sedangkan yang merupakan sasaran kebijakan ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak, lifting minyak, neraca pembayaran, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Serta yang tak kalah pentingnya adalah membahas asumsi dasar RAPBN 2012 seperti pada tabel 2 yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7%, inflasi 5,3%, suku bunga SPN 3 bulan 6,5%, nilai tukar Rp8.800/US\$, harga minyak US\$90/barel, dan lifting 950 ribu barel per hari, c) pokok-pokok kebijakan fiskal, yang terdiri dari kebijakan fiskal 2006-2010, kebijakan fiskal dan perkiraan realisasi APBN-P 2011, kebijakan fiskal 2012, dan dampak makro APBN. Tentang kebijakan fiskal 2012, juga diuraikan tentang tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Selain itu juga diuraikan tentang kebijakan RAPBN 2012, yang mencakup

tema RKP tahun 2012 yaitu “Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat” yang selanjutnya dijabarkan menjadi prioritas pembangunan nasional, yaitu (a) reformasi birokrasi dan tata kelola, (b) pendidikan, (c) kesehatan, (d) penanggulangan kemiskinan, (e) ketahanan pangan, (f) infrastruktur, (g) iklim investasi dan iklim usaha, (h) energy, (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, dan (k) budaya, kreativitas, dan inovasi teknologi, serta tiga prioritas nasional lainnya yaitu: pada bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat. Selanjutnya juga diuraikan tentang kebijakan dalam pendapatan Negara

peluang kebijakan pendapatan Negara, c) sasaran pendapatan Negara dan hibah tahun 2012, pendapatan negara yang ditargetkan dalam RAPBN 2012 adalah sebesar Rp1.292,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.292,1 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,8 triliun.

Sedangkan Bab IV membahas anggaran belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari: a) evaluasi perkembangan pelaksanaan kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat 2006-2011, b) kaitan antara RKP tahun 2012 dengan anggaran belanja pemerintah pusat APBN 2012, c) alokasi anggaran belanja pemerintah pusat RAPBN tahun 2012.

Diuraikan juga dalam bab ini tema “Percepatan dan perluasan pertumbuhan

pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penyerapan tenaga kerja (*pro job*), dan pengurangan kemiskinan (*pro poor*), serta ramah lingkungan (*pro environment*). Selain itu juga dijelaskan tentang total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp954,1 triliun, dan subsidi yang mencapai 207,3 triliun.

Bab V membahas kebijakan desentralisasi fiskal, yang terdiri dari: a) perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2006-2010, yang mencakup perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal, perkembangan pengelolaan keuangan daerah, perkembangan transfer ke daerah, implikasi desentralisasi fiskal terhadap perkembangan ekonomi daerah dan transfer ke daerah, b) kebijakan belanja transfer ke daerah



dan hibah, kebijakan belanja Negara, kebijakan transfer ke daerah, dan kebijakan pembiayaan anggaran. Serta yang tak kalah pentingnya adalah ringkasan postur RAPBN 2012 seperti tabel 3.

Bab III membahas pendapatan negara dan hibah, membahas lebih detail tentang: a) perkembangan pendapatan Negara dan hibah tahun 2006-2010 dan perkiraan pendapatan Negara dan hibah tahun 2011, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah b) tantangan dan

ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat” diterjemahkan dalam alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan prioritas dan menurut organisasi, fungsi, dan jenis. Selain itu, juga diuraikan bagaimana alokasi belanja pemerintah pusat diarahkan untuk memberikan stimulus perekonomian, dan mendukung pencapaian target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang berpihak pada

tahun 2012, yang menguraikan kebijakan desentralisasi fiskal ke depan, yang tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal, guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu juga dijelaskan tentang belanja transfer ke daerah yang mencapai Rp464,4 triliun, yang terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp394,1 triliun dan dana otonomi khusus dan



penyesuaian mencapai Rp70,2 triliun.

Pada Bab VI membahas pembiayaan defisit anggaran dan risiko fiskal, yang terdiri dari: a) perkembangan realisasi defisit dan pembiayaan APBN 2005-2011, baik pembiayaan utang maupun nonutang, b) rencana pembiayaan deficit anggaran APBN tahun 2012, baik pembiayaan utang maupun nonutang, c) risiko fiskal, yang diperlukan terutama dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan kebijakan fiskal, meningkatkan keterbukaan fiskal (*fiscal transparency*), meningkatkan tanggung jawab fiskal (*fiscal accountability*), serta menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Sedangkan yang dibahas dalam risiko fiskal antara lain mengenai analisis sensitivitas, risiko utang pemerintah pusat, kewajiban kontijensi pemerintah pusat, dan desentralisasi fiskal. Selain itu juga diuraikan tentang total pembiayaan anggaran yang pada tahun 2012 mencapai Rp125,6 triliun atau 1,5% terhadap PDB, yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125,9 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif 0,3 triliun.

Akhirnya Bab VII membahas pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan proyeksi APBN jangka menengah, yang terdiri dari a) penganggaran berbasis kinerja dan penerapannya, b) kerangka pengeluaran jangka menengah dan penerapannya, c) proyeksi APBN jangka menengah, yang mencakup proyeksi asumsi dasar, proyeksi pendapatan Negara dan hibah, proyeksi belanja Negara, dan proyeksi pembiayaan anggaran.

Tantangan Kedepan

Nota Keuangan disusun menyesuaikan perkembangan jaman, dimana isinya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dihadapi, seperti pada tahun 2012, terdapat tambahan bab VII yang membahas pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan proyeksi APBN jangka menengah. Bagaimana dengan tantangan kedepan? Tantangan kedepan Nota Keuangan yaitu upaya agar isi NK tersebut tetap

bisa mengikuti perkembangan jaman dan tidak ketinggalan, untuk itu semangat *continuous improvement* tidak bisa dilewatkan. Semoga NK tetap bisa menjawab tantangan tersebut. ■

*Penulis adalah Kasubdit Penyusunan
Pembiayaan Anggaran dan
Penganggaran Risiko Fiskal, DJA*

Referensi :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Aman-demen Keempat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD;
4. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
5. Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2012;
6. Nota Keuangan berbagai tahun;
7. <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Saya sedikit memberi gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan widyaiswara sebagaimana yang ditanyakannya. Untuk beberapa jenak sahabat saya itu terdiam, namun dengan air muka yang tak berubah. Saya sempat menduga ia akan ragu melanjutkan langkahnya mengikuti seleksi widyaiswara, tetapi peraih gelar master dari Yokohama itu tak bergeming. Menjadi widyaiswara, menurutnya, "it's my passion".

Menjadi Widyaiswara BPPK *It's My Passion*



Oleh: Ismoyo Sedjati

Dalam organisasi yang dinamis seperti halnya BPPK hari ini, sumber daya manusia menjadi elemen fundamental yang memegang kunci sukses perubahan itu, sebagaimana pakar SDM Dave Ulrich menyatakan bahwa manajemen SDM pada hakikatnya adalah *"a strategic partner role, where you help turn strategy into results by building organizations that create value"* dan *"the change agent role, where you help make change happen and, in particular, you help it happen fast"*.

BPPK belum berhenti untuk terus berubah. Penyiapan SDM, salah satunya melalui rekrutmen widyaiswara, adalah salah satu jawaban atas tuntutan perubahan. Melanjutkan rekrutmen widyaiswara tahun 2010 yang berhasil menjangkir 39 widyaiswara baru dalam jajaran BPPK, tahun 2011 ini BPPK kembali melakukan rekrutmen widyaiswara. Mengacu pada Surat Edaran Kepala BPPK nomor SE-003/PP/2011, BPPK kembali membuka lowongan untuk memenuhi kebutuhan 146 jabatan widyaiswara pada berbagai

spesialisasi. Target pemenuhan Indikator Kinerja Utama BPPK yaitu persentase jam diklat terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan yang tahun ini dipatok sebesar 2 persen, dan akan menjadi 5 persen pada tahun 2014, membutuhkan ketersediaan widyaiswara dari sisi jumlah maupun spesialisasi.

Bagian Kepegawaian BPPK dalam menentukan kebutuhan widyaiswara sejumlah diatas mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara. Namun selain hal tersebut penentuan jumlah tersebut juga mengakomodasi kebutuhan unit-unit BPPK. Menurut Kasubbag Umum BDK Balikpapan, Marianto, kebutuhan widyaiswara pada unitnya dirasakan menjadi

mendesak mengingat dua widyaiswara yang ada di BDK Balikpapan dalam waktu dekat ini tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit dan sedang menempuh beasiswa di luar negeri.

Fragmen pada paragraf pembuka diatas, adalah bagian tak teruliskan dari salah satu persyaratan

Unit	Kebutuhan
Pusdiklat Pengembangan SDM Magelang	4 orang
Pusdiklat Pengembangan SDM Jakarta	4 orang
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	6 orang
Pusdiklat Pajak	22 orang
Pusdiklat Bea dan Cukai	13 orang
Pusdiklat Kekayaan Negara dan PK	12 orang
Pusdiklat Keuangan Umum	4 orang
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	40 orang
Balai Diklat Keuangan Medan	2 orang
Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	3 orang
Balai Diklat Keuangan Palembang	8 orang
Balai Diklat Keuangan Cimahi	3 orang
Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	5 orang
Balai Diklat Keuangan Malang	2 orang
Balai Diklat Keuangan Denpasar	2 orang
Balai Diklat Keuangan Pontianak	1 orang
Balai Diklat Keuangan Balikpapan	5 orang
Balai Diklat Keuangan Makassar	7 orang
Balai Diklat Keuangan Manado	3 orang

Unit Asal Pelamar	Jumlah
Direktorat Jenderal Pajak	24 orang
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5 orang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	14 orang
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	1 orang
Direktorat Jenderal Anggaran	2 orang
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	3 orang
Non Kementerian Keuangan	3 orang
JUMLAH	52 orang

administratif tahap pertama seleksi calon widyaiswara. Sesuatu yang baru pada rekrutmen tahun ini: para pelamar wajib membuat tulisan tangan terkait dengan alasan memilih menjadi widyaiswara. Maka sesuai persyaratan tersebut, panitia seleksi calon widyaiswara musti membaca sebanyak 52 tulisan pelamar dari berbagai unit kementerian keuangan maupun diluar kementerian keuangan, yaitu BPKP dan kementerian BUMN. "Saya tak menduga bahwa tulisan tangan itu benar-benar menjadi pertimbangan kelulusan tahap administrasi ini. Saya kurang maksimal membuat tulisan itu" demikian Junaidy Syamsudin, pelamar dari Direktorat Jenderal Anggaran, satu diantara pelamar yang tidak dapat melanjutkan ke tahap tes *assessment*.

Melalui Pengumuman Kepala

yaitu tes psikologi dan *assessment*. Tes ini sendiri berlangsung pada 13 dan 14 Juli dimana dua orang peserta tes tidak hadir alias mengundurkan diri. Salah satu asesor BPPK, Jumali, menyebutkan bahwa *assessment center* adalah satu perangkat tes untuk mengetahui *soft competencies* dari calon widyaiswara berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. "Rata-rata peserta seleksi telah memiliki pengalaman mengajar di PTN dan PTS, namun dalam *assessment* ini kompetensi yang dilihat bukan hanya itu" demikian paparnya.

Hasil tes psikologi dan tes *assessment* ini diumumkan melalui Pengumuman kepala BPPK nomor PENG-004/PP/2011 tanggal 29 Juli 2011. Dalam pengumuman tersebut

BPPK Nomor PENG 003/PP/2011 dari 52 pelamar yang menyerahkan berkas administrasi pendaftaran, sebanyak 32 orang dinyatakan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya

sembilan orang pelamar dinyatakan lulus tes *assessment* dan berhak mengikuti tahapan tes berikutnya yaitu tes wawancara dan pemaparan bahan ajar yang dijadwalkan pada 9 Agustus 2011. Dalam tahap ini, pelamar mengikuti wawancara dan memaparkan bahan ajar ini dihadapan Kepala Badan dan para pejabat eselon II BPPK. Secara umum para pelamar menyampaikan paparannya sesuai bidang pekerjaan yang ditekuninya. Namun demikian pewawancara terkadang melontarkan pertanyaan diluar konteks bahan ajar yang disampaikan, khususnya kesanggupan untuk ditempatkan pada semua unit diklat BPPK, termasuk pada Balai Diklat Keuangan di 12 kota.

Dari sembilan peserta tes wawancara dan pemaparan bahan ajar, delapan nama akhirnya berhak mengikuti tahap final seleksi penerimaan widyaiswara BPPK yaitu Diklat Calon Widyaiswara, demikian sesuai pengumuman Kepala BPPK nomor PENG-005/PP/2011 tanggal 19 Agustus 2011. Salah satu dari delapan nama itu adalah Suhut Tumpal Sinaga peserta seleksi dari Direktorat Jenderal Pajak. "Rasanya melelahkan mengikuti proses seleksi ini, karena saya berkantor di Balikpapan. Benar-benar menyita konsentrasi, biaya dan waktu, terutama dalam mempersiapkan setiap tahapan tes" demikian kesan yang diperolehnya selama berproses menjadi calon widyaiswara. Ia, yang tak banyak memahami dunia widyaiswara, mau tak mau harus banyak mencari referensi untuk menempuhi seleksi yang dinilainya sangat kompetitif ini. Ketika saya mengonfirmasi kembali apakah ia masih bersemangat melanjutkan prosesnya di tahap akhir seleksi ini? Ia memberi jawaban yang sama seperti beberapa saat yang lalu, "menjadi widyaiswara? It's my passion". ■

Penulis adalah Kasubbag
Pengembangan Pegawai pada
Sekretariat BPPK





Derap Langkah Balai Diklat Keuangan Palembang

Oleh: Tim BDK Palembang

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas di atas, visi yang akan dituju oleh BPPK adalah menjadikan BPPK sebagai pusat unggulan diklat keuangan negara dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Salah satu unit pelaksana teknis BPPK di daerah adalah Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang, dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. BDK Palembang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan berbagai diklat di bidang keuangan negara di ketiga provinsi di atas, baik secara reguler (dengan menggunakan anggaran BPPK) maupun dalam bentuk kerja sama (dengan menggunakan anggaran instansi lain selaku mitra kerja).

BDK Palembang berlokasi di Jl. Sukabangun II, Sukarami, Palembang. BDK Palembang menempati lokasi ini sejak akhir 2004, karena sebelumnya BDK Palembang berlokasi di Jl. Kapten A. Rivai, Palembang dan Jl. Kol. Atmo, Palembang. Sejak berdiri pada tahun 1992, BDK Palembang telah dipimpin oleh 6 Kepala BDK, yaitu Supratman

Sasmita (1992-1997), Agus Hermanto (1997-2000), Ruslan Hamid (2000-2003), Chandra Mai (2004-2007), Anthonius R. Samosir (2007-2010), dan Zainal Fatah (2010-2011).

LAYANAN DIKLAT

Hingga saat ini, telah banyak diklat yang diselenggarakan di BDK Palembang. Diklat yang rutin digelar selama 3 tahun terakhir (tahun 2009 – 2011) antara lain Diklat Struktural (Ujian Dinas & Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat), Diklat Prajabatan (bagi golongan II maupun III), dan Diklat Teknis/Fungsional/Penyegaran

(Bendahara Pengeluaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Belanja Pegawai, Penguji Tagihan, Pengelolaan APBN, Bendahara Penerimaan, *Account Representative* (AR) Pajak, Juru Sita Pajak, Kesamaptaan Bea dan Cukai, dan DTSD Kepabeanaan dan Cukai). Jika hingga tahun 2010 diklat teknis/fungsional yang diselenggarakan masih berkisar pada diklat di bidang anggaran dan perbendaharaan, pajak, serta kepabeanaan dan cukai, maka pada tahun 2011 diklat yang diselenggarakan di BDK Palembang makin diperluas dengan diklat di bidang keuangan



Tabel 1:
Gambaran diklat di BDK Palembang selama tahun 2011 beserta sebaran instansi asal peserta serta jumlah lulusannya (sampai dengan 25 Juli 2011)

No	Diklat	Waktu	Instansi asal peserta (data realisasi)							Total	Lulus
			DJPB	DJP	DJBC	DJKN	GKN	BPPK	Luar		
Diklat Teknis, Fungsional, & Penyebaran											
1	DTU Kesamaptan BC	7 Feb – 10 Mar			28					28	28
2	DTSS PBJ (*)	14 Feb – 2 Mar	7	12	6		4		1	30	15
3	DTSS Bendahara Pengeluaran	28 Feb – 15 Mar	7	12					6	25	21
4	DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai	7 Mar – 18 Mar	7	12	2				4	25	25
5	Diklat Penyebaran PBJ (*)	8 Mar – 10 Mar	16	25	7				2	50	30
6	DTSS Penguji Tagihan	21 Mar – 1 Apr	6	7	2	2		1	11	29	27
7	DTSD I Bea dan Cukai	28 Mar – 16 Juni			30					30	29
8	DTSS AR Pajak (**)	11 Apr – 15 Apr		26						26	
9	DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara	19 Mei – 1 Juni	4	12	7	1		3		27	26
10	DTU Tata Naskah Dinas (**)	13 Juni – 17 Juni	16	15	3	2			4	40	
11	DTU Balance Scorecard (BSC) (***)	25 Juli – 29 Juli	14	13	5			1		33	
Diklat Struktural dan Prajabatan											
12	Diklat Prajabatan Golongan II periode I (****)	20 Juni – 1 Juli	15	28	10	4		3		60	
13	Diklat Ujian Dinas (UD) Tingkat I periode I	7 Mar – 17 Mar	5	11	4	6				26	18
14	Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat IV (***)	18 Juli – 28 Juli	3	3				1		6	
15	Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat V (***) periode I	18 Juli – 29 Juli	10	25		3				38	
Total			110	200	104	18	4	7	13		
Diklat yang akan dilaksanakan lebih lanjut											
	Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat V periode II	12 Sep – 16 Sep									
	Diklat Ujian Dinas (UD) Tingkat I periode II	19 Sep – 30 Sep									
	Diklat Prajabatan Golongan III periode I	10 Okt – 25 Okt									
	Diklat Prajabatan Golongan III periode II	27 Okt – 11 Nov									

Keterangan:

(*) Untuk DTSS PBJ dan Diklat Penyebaran PBJ ujian bersifat pretest dan posttest dan peserta hanya dinyatakan telah mengikuti diklat. Ujian sertifikasi dilaksanakan oleh LKPP. Peserta yang lulus ujian sertifikasi (berhak mendapat sertifikat dari LKPP) adalah 15 orang dari Diklat PBJ dan 30 orang dari Diklat Penyebaran PBJ.

(**) Untuk DTSS AR Pajak dan DTU Tata Naskah Dinas peserta hanya dinyatakan telah mengikuti diklat.

(***) Untuk DTU BSC, UPKP IV, dan UPKP V, diklat masih sedang berlangsung saat tulisan ini dibuat.

(****) Untuk Diklat Prajabatan, diklat telah selesai, akan tetapi belum ada keputusan hasil kelulusan diklat dari Pusdiklat PSDM.

umum serta di bidang kekayaan negara dan pertimbangan keuangan. Gambaran diklat di BDK Palembang selama tahun 2011 beserta sebaran instansi asal peserta dan jumlah lulusannya dapat dilihat pada tabel 1.

Dari peserta diklat yang dinyatakan lulus, predikat kelulusan diklat dapat dilihat pada tabel 2.

PROFIL BEBERAPA DIKLAT

Sebagai gambaran mengenai pelaksanaan diklat di BDK Palembang, berikut ini adalah profil tiga diklat terakhir yang sudah selesai diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Palembang.

1. DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah diselenggarakan pada tanggal 19 Mei s.d. 1 Juni 2011. Setelah mengikuti diklat ini, lulusan diklat diharapkan mampu menerapkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik dalam pengelolaan barang milik negara di instansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang diajarkan dalam diklat adalah Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan BMN; Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN; Penatausahaan BMN; Aplikasi Persewaan; Aplikasi SIMAK BMN; Penilaian BMN (Non Tanah & Bangunan); serta Pengamanan, Pemeliharaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMN. Pada tahun ini, seluruh pengajar diklat berasal dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Palembang.

Dari 27 orang peserta diklat, sebanyak 26 peserta diklat dinyatakan lulus, dan yang dinyatakan lulus dengan predikat baik adalah sebanyak 22 orang, selebihnya (4 orang) mendapat predikat cukup. Tingkat kelulusan diklat yang tinggi, yaitu sebesar 96%, menunjukkan bahwa tingkat penyerapan ilmu mengenai pengelolaan BMN oleh peserta diklat termasuk tinggi, sehingga sangat dapat diharapkan bahwa lulusan diklat nantinya mampu secara terampil menerapkan ilmu dan berperilaku positif dalam mengelola BMN di instansinya masing-masing.

2. DTU Tata Naskah Dinas

DTU Tata Naskah Dinas diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Palembang mulai tanggal 13 Juni s.d. 17 Juni 2011. Setelah mengikuti diklat ini, lulusan diklat diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik dalam menerapkan tata naskah dinas di instansinya guna memperlancar komunikasi tertulis dan menerapkan tertib

Tabel 2:
Jumlah lulusan dan predikat lulusan diklat di BDK Palembang selama tahun 2011

No	Diklat	Total	Lulus	Berpredikat Baik	% Lulusan Berpredikat Baik dari keseluruhan lulusan
1	DTU Kesamaptan BC	28	28	28	100,00
2	DTSS Bendahara Pengeluaran	25	21	17	80,95
3	DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai	25	25	17	68,00
4	DTSS Penguji Tagihan	29	27	21	77,78
5	DTSD I Bea dan Cukai	30	29	27	93,10
6	DTSS Pengelolaan BMN	27	26	22	84,62



Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI, serta Program Kokurikuler (Latihan Kebugaran Jasmani, Baris-Berbaris, Tata Upacara Sipil, Pengarahan Program, Ceramah Umum Muatan Teknis Substantif Lembaga, dan Ceramah Kesehatan Mental). Pada tahun ini, seluruh pengajar diklat berasal dari Pengajar/instruktur/penceramah dalam diklat ini berasal dari pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (DJBC, DJP, DJKN, DJPB, BPPK) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kepegawaian Negara Regional Sumatera Selatan, Politeknik Kesehatan Sumatera Selatan, serta anggota TNI dari Batalyon Infanteri 200 Raiders TNI-AD.

administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Materi yang diajarkan dalam diklat adalah Kerangka Umum Tata Naskah Dinas; Penyusunan Naskah Dinas; Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas; Tata Persuratan Dinas Kementerian Keuangan; Penatausahaan Surat Dinas; Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas; Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas; serta Praktek Penyusunan Naskah Dinas. Pada tahun ini, seluruh pengajar diklat berasal dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, kecuali materi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas yang diajarkan oleh pengajar dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah mengikuti diklat ini, lulusan diklat diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang profesional (dilandasi kepribadian dan etika PNS) sebagai pegawai golongan II di instansinya masing-masing. Materi yang diajarkan dalam diklat adalah Dinamika Kelompok, Pola Pikir (Mind Setting) PNS, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI, Kepemerintahan yang Baik, Manajemen Kepegawaian Negara, Etika Organisasi Pemerintahan, Pelayanan Prima, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Percepatan Pemberantasan Korupsi, Manajemen Perkantoran Modern, Membangun Kerja Sama Tim (Team Building), Komunikasi Yang Efektif, Wawasan

Selama diklat, para peserta diasramakan di Balai Diklat Keuangan Palembang dan diawasi sepenuhnya (selama 24 jam penuh) oleh pengawas/pelatih dari Batalyon Infanteri 200 Raiders TNI AD. Melalui pengawasan penuh ini diharapkan aspek sikap dan perilaku (terutama kedisiplinan) siswa dapat terjaga, apalagi dalam kegiatan sehari-hari para siswa pun wajib mengikuti kegiatan dengan kedisiplinan yang tinggi (seperti militer), antara lain dalam tata cara penghormatan kepada pegawai, tata cara makan, tata cara tinggal di asrama, dan sebagainya

Dari 40 orang peserta yang mengikuti diklat, baru sebanyak 22 peserta diklat (55%) mendapatkan predikat baik (nilai akhir lebih dari 76). Masih rendahnya persentase jumlah peserta diklat yang memiliki predikat baik menunjukkan masih belum optimalnya tingkat penyerapan materi oleh peserta diklat, sehingga di masa datang diperlukan pembenahan/penyempurnaan yang lebih maksimal dalam pelaksanaan diklat ini.

3. Diklat Prajabatan Golongan II

Diklat Prajabatan Golongan II, yang merupakan persyaratan mutlak yang harus diikuti oleh seluruh calon pegawai negeri sipil, diselenggarakan pada tanggal 20 Juni s.d. 1 Juli 2011.



TANTANGAN KE DEPAN

Sebagai lembaga pendidikan di bidang keuangan negara dengan wilayah kerja yang sangat luas (menangani beberapa provinsi di wilayah Sumatera bagian Selatan), tantangan yang dihadapi BDK Palembang sangatlah besar. BDK Palembang harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh instansi pemerintah (pusat maupun daerah) maupun masyarakat di wilayah Sumatera bagian Selatan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dikelolanya dalam bidang keuangan negara sejalan dengan perkembangan daerah dan institusi di dalamnya. BDK Palembang harus mampu menjaga dan meningkatkan citra BPPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya di mata masyarakat melalui layanan diklat yang prima, yang

1. Melakukan koordinasi yang lebih aktif dengan berbagai instansi pemerintah (pusat maupun daerah) di Sumatera bagian Selatan serta Pusdiklat terkait untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan diklat yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan oleh instansi pengguna, sekaligus menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BDK Palembang.
2. Berupaya dan lebih menggiatkan penyelenggaraan diklat-diklat unggulan dan diklat-diklat baru yang memang sangat dibutuhkan oleh instansi pengguna maupun masyarakat luas, seperti:
 - a. Di bidang Anggaran dan Perbendaharaan (Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Penyegaran PBJ (disertai Ujian

- Scorecards, Protokol, Pelayanan Prima, dan sebagainya)
- e. Di bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pengelolaan Barang Milik Negara, SIMAK BMN, Pengelolaan Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan, dan sebagainya)
- f. Seminar/workshop di bidang keuangan negara (akuntansi, audit, pajak, dan sebagainya)

Agar diklat-diklat di atas dapat berlangsung dengan sukses, sejak awal 2011 BDK Palembang juga telah melaksanakan berbagai kegiatan non diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya BDK. BDK juga akan merevisi dan mengatur kembali pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya BDK (SDM, keuangan, dan fasilitas) agar tercipta penggunaan sumber daya BDK yang optimal dan terselenggara layanan diklat yang prima, antara lain:

1. Peningkatan dan pengembangan kompetensi diri pegawai (memotivasi pegawai untuk mengikuti diklat dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi) sejalan dengan kebutuhan BDK.
2. Mengelola keuangan (kas) BDK secara lebih efektif dan efisien.
3. Mengelola dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas aset BDK (ruang kelas, asrama, kantor, dan fasilitas lainnya beserta perlengkapannya), sehingga selalu dalam keadaan "layak dan siap pakai" untuk menunjang kegiatan diklat maupun nondiklat.

Segala kegiatan di atas merupakan wujud derap langkah BDK Palembang sejak saat ini yang pada hakekatnya bertujuan untuk memacu perkembangan BDK Palembang "MENUJU BALAI DIKLAT KEUANGAN YANG IDEAL" sesuai dengan motto BDK Palembang, yaitu "SENANTIASA BERUSAHA MENJADI YANG TERDEPAN" dalam pengembangan aktivitas dan citra BPPK dan Kementerian Keuangan. ■



bisa menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu berperan serta secara aktif untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, guna mendukung pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional.

Dalam menghadapi tantangan di atas, sejak awal tahun 2011 BDK Palembang telah mencanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan mutu dan jumlah diklat yang diselenggarakannya. Di bidang penyelenggaraan diklat, BDK Palembang akan:

- Sertifikasi Ahli PBJ), Bendahara Pengeluaran, dan sebagainya)
- b. Di bidang Pajak (Account Representative Pajak, Juru Sita Pajak, Pengelolaan PBB/BPHTB, Brevet Pajak, dan sebagainya)
- c. Di bidang Kepabeanaan dan Cukai (diklat teknis kepabeanaan dan cukai dan diklat bagi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan)
- d. Di bidang Keuangan Umum (Tata Naskah Dinas, Legal Drafting, Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, Penyusunan SOP, Balance



Berita dari Magelang

NOMENKLATUR BARU, *Asa Baru*

Oleh : Febta Rina Handayani

Hari itu, Jumat tanggal 10 Juni 2011 merupakan hari yang istimewa bagi Pusdiklat Pengembangan SDM di Magelang. Kenapa Istimewa? Pada hari itu, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Salah satu yang dilantik pada saat itu adalah Kepala Balai Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Magelang yaitu Bapak Unggul Kusalanwan Respatiadi. Dengan pelantikan tersebut resmi sudah nomenklatur Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Magelang dapat digunakan. berdasarkan PMK Nomor 52/PMK-01/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Tak berselang dari pelantikan

tersebut pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2011 dilaksanakan pembukaan Diklatpim Tingkat IV angkatan ke-144 Di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Pembukaan ini juga sebagai penanda digunakannya gedung asrama baru untuk ditempati oleh peserta Diklatpim untuk pertama kalinya. Gedung asrama dengan kapasitas enam belas kamar tersebut memang baru difungsikan untuk asrama peserta diklat sejak serah



terima tanggal 31 Desember 2010, karena harus diisi furniturnya terlebih dahulu.

Dengan difungsikannya gedung asrama baru tersebut maka di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang pada satu periode dapat dilaksanakan empat angkatan diklatpim. Karena kapasitas asrama yang lama hanya mampu menampung 90 peserta diklatpim atau sebanyak tiga angkatan diklatpim dalam satu periode. Saat ini Diklatpim yang sedang berlangsung di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang adalah Diklatpim Tingkat III Angkatan ke-38, Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-143, Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-144, Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-145.

Apa itu Diklatpim? Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang hanya menyelenggarakan Diklatpim Tingkat III dengan peserta para pejabat atau calon pejabat eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan dan Diklatpim tingkat IV dengan peserta para pejabat atau calon pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian Keuangan. Masing-masing penyelenggaraan diklat tersebut harus diasramakan dan untuk Diklatpim Tingkat III selama tujuh minggu dengan kurikulum 360 jam pelatihan, sedangkan Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan selama enam minggu dengan 285 jam pelatihan.

Salah satu bagian dari kurikulum Diklatpim adalah adanya ceramah

pimpinan. Pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2011, Kepala BPPK, Bapak Kamil Sjoeb berkenan memberikan ceramah pimpinan di depan peserta Diklatpim Tk. III Angkatan ke-37 yang pada saat itu sudah akan selesai pelaksanaan diklatnya, Diklatpim Tingkat III Angkatan ke-38, dan Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-143. Dalam ceramahnya Kepala BPPK mengambil tema Kilas Balik Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan. Kepala BPPK mengajak seluruh peserta Diklatpim untuk merenungkan kembali, meresapi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi birokrasi. Kesungguhan semua pihak, khususnya peserta diklatpim dalam melaksanakan reformasi birokrasi diharapkan akan lebih mempercepat terwujudnya target dan sasaran reformasi birokrasi. Target dan sasaran reformasi birokrasi ini sebagaimana tersirat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah terwujudnya

birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien dan hemat, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani, birokrasi yang terdesentralisasi, dan yang tidak boleh dilupakan adalah diutamakan sumber dana untuk remunerasi diperoleh dari realokasi/ optimalisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga.

Melengkapai kurikulum Diklatpim, ada hal yang spesial pada penyelenggaraan Diklatpim di Bulan Juli. Secara tidak terduga disela-sela kesibukan Menteri Keuangan mendampingi Presiden, beliau berkenan memberikan ceramah di hadapan peserta Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim tingkat IV. Dalam ceramahnya Menteri Keuangan, Bapak Agus Martowardojo menyampaikannya baik buruknya organisasi sangat tergantung pada sumber daya manusia di dalamnya, dan sumber daya manusia yang PROFESIONAL-lah yang akan bisa mewujudkan tujuan organisasi. Profesionalisme disini tidak hanya dilihat dari aspek ketrampilan, keahlian, kepintaran, kecakapan dan sebagainya, namun yang lebih penting adalah KARAKTER diri pribadi yang mesti harus dijaga, dibina dan ditingkatkan. Perbaikan-perbaikan serta peningkatan kompetensi harus selalu dilakukan dan diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan karakter, dan mungkin inilah yang lebih sulit untuk dilakukan. Tanpa kesungguhan dan itikad dari masing-masing individu, mustahil hal tersebut akan bisa diwujudkan. Sambil bercanda dan tetap dalam suasana yang hangat, beliau juga memberikan contoh-contoh konkrit perwujudan individu yang profesional dan berkarakter dan berharap hal tersebut bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua.

Lebih lanjut beliau berpesan bahwa sebagai seorang pemimpin, harus bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya (bawahan). Untuk dapat menjadi panutan yang baik, beliau menyampaikan "resep" bahwa apa yang ada dalam hati dan pikiran kita harus sesuai dengan perbuatan dan

perkataan kita. Beliau menggambarkan seorang pimpinan yang perbuatannya tidak sesuai (atau bahkan berlawanan) dengan apa yang dikatakannya, niscaya akan tidak dipercaya oleh bawahannya dan juga oleh rekan kerja, relasi dan juga atasan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan Diklatpim pada paruh waktu sampai bulan Juli akan berakhir tepat pada tanggal 30 Juli yaitu dengan ditandainya penutupan Diklatpim Tingkat III Angkatan ke-38 dan Diklatpim Tingkat IV angkatan ke-145. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV angkatan-angkatan selanjutnya ini akan berlanjut pada Bulan September. Masih ada beberapa Diklatpim yang akan diselenggarakan yaitu:

1. Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-146 dari tanggal 19 September sampai dengan 29 Oktober 2011
 2. Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-147 dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Nopember 2011
 3. Diklatpim Tingkat IV Angkatan ke-148 dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 26 Nopember 2011
 4. Diklatpim Tingkat III Angkatan ke-39 dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 19 Nopember 2011
- Selain Diklatpim, Balai Diklat

Kepemimpinan juga akan menyelenggarakan Diklat Kompetensi Khas bagi pimpinan diantaranya Diklat *Public Speaking For Professional Leaders* dan Diklat *Interpersonal Skill*. Diklat *Public Speaking For Professional Leaders* digagas untuk meningkatkan dan memantapkan kompetensi khusus SDM Kementerian Keuangan. Kompetensi khusus SDM Kementerian Keuangan yang ingin ditingkatkan dan disegarkan melalui diklat ini adalah kemampuan dalam berbicara di depan publik. Sedangkan Diklat *Interpersonal Skills* digagas untuk meningkatkan soft competency pegawai Kementerian Keuangan dalam hal keahlian interpersonalnya.

Pada akhirnya dengan nomenklatur baru tersebut, seluruh komponen Balai Diklat Kepemimpinan Magelang berharap lebih bisa memberikan yang terbaik dalam rangka memberikan pelayanan kepada peserta diklat. Pada akhirnya Balai Diklat Kepemimpinan Magelang berharap bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. ■

Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

“Baik buruknya organisasi sangat tergantung pada sumber daya manusia di dalamnya, dan sumber daya manusia yang PROFESIONAL-lah yang akan bisa mewujudkan tujuan organisasi.”

Kebijakan DAK Tahun Anggaran 2011

Oleh Tanda Setiya

Pemerintah terus berupaya membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 dinyatakan bahwa alokasi dana perimbangan sebesar Rp392,9 triliun. Dari alokasi dana yang sebanding dengan seperempat alokasi dana total APBN 2011 tersebut sebesar Rp25,2 triliun digunakan untuk membantu mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah dengan mekanisme DAK. Terkait dengan hal tersebut, tulisan berikut akan menguraikan beberapa hal terkait kebijakan DAK TA. 2011.

Arah kebijakan DAK TA 2011 menurut Direktur Jenderal Perimbangan keuangan terdiri dari 3 hal pokok yaitu 1) mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja; 2) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; dan 3) meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK

dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Guna mendukung tiga kebijakan DAK 2011 tersebut maka DAK 2011 terbagi dalam 19 bidang dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Kebijakan penentuan perhitungan alokasi DAK TA 2011 mendasarkan pada

tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum yaitu dimana dalam memperhitungkan alokasi dana dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

Penentuan alokasi DAK dengan kriteria khusus dimaksudkan bahwa penetapan DAK mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis merupakan kebijakan teknis yang ditetapkan K/L sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa DAK merupakan *spesifik grand*, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Daerah penerima harus sesuai dengan arah kegiatan yang telah ditetapkan dalam arah kebijakan kegiatan DAK. Untuk

DANA ALOKASI KHUSUS		dlm Rp. miliar
No	Bidang DAK	Pagu Alokasi DAK 2011
1	Pendidikan	10.041,30
2	Kesehatan	3.000,8
3	Infrastruktur Jalan	3.900,0
4	Infrastruktur Irigasi	1.311,8
5	Infrastruktur Air Minum	419,6
6	Sanitasi	419,6
7	Prasarana Pemerintahan Daerah	400,0
8	Kelautan dan Perikanan	1.500,0
9	Pertanian	1.806,1
10	Lingkungan Hidup	400,0
11	Keluarga Berencana	368,1
12	Kehutanan	400,0
13	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	315,5
14	Sarana Perdagangan	300,0
15	Listrik Pedesaan	150,0
16	Perumahan dan Permukiman	150,0
17	Keselamatan Transportasi Darat	100,0
18	Transportasi Pedesaan	150,0
19	Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	100,0
Total		25.232,80

TA 2011 arah kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel.

DAK disamping dikenal sebagai *specific purpose grant* juga memiliki karakteristik *matching purpose grant* karena berdasarkan kebijakan yang ada Pemda harus menyediakan dana sebesar 10 % dari alokasi DAK. Lebih lanjut diatur bahwa dana pendamping tersebut digunakan untuk kegiatan fisik juga.

Yang perlu diperhatikan juga dalam kebijakan DAK 2011 adalah bahwa hasil kegiatan yang didanai dari DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011, hal ini sejalan dengan masa laku pelaksanaan DAK yaitu hingga 31 Desember 2011.

Kebijakan penyaluran dana DAK melalui mekanisme transfer dari rekening BUN ke rekening BUD secara bertahap per triwulanan. Sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh K/L teknis selaku pembina dan Kementerian Keuangan sedangkan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh semua pihak baik K/L, Kementerian Keuangan dan Pemda terkait evaluasi DAK TA. 2010 diantaranya :

1. Monitoring DAK terpadu oleh Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian Teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri No. 0239/M. PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan, Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK, yang ada saat ini belum efektif sehingga diperlukan revisi SEB tersebut.
2. Masih adanya tumpang tindih bidang-bidang DAK.
3. DAK bersifat stimulan, bukan sebagai substitusi pada kegiatan bidang-bidang terkait.
4. Peraturan tentang Penetapan Juknis DAK paling lambat 2 minggu setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman

Bidang	Arah Kegiatan
Pendidikan	Menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD/SLB dan SMP)
Kesehatan	Kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan rujukan dan farmasi.
Jalan	Membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan sedang dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah.
Irigasi	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi dan rawa guna menunjang prioritas ketahanan pangan nasional.
Air Minum	Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum terutama untuk daerah berpenghasilan rendah.
Sanitasi	Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, pengelolaan sampah dengan 3R (reduce, reuse, dan recycle), dan pengembangan sarana prasarana drainase mandiri berwawasan lingkungan.
Prasarana Pemda	Pembangunan/pelebaran/rehab kantor pemerintah daerah (Dati I/II dan SKPD khususnya daerah pemekaran dan belum mendapatkan alokasi DAK tahun sebelumnya).
Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan di wilayah pesisir dan pulau kecil khususnya daerah minapolitan.
Pertanian	Meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung pencapaian prioritas nasional ketahanan pangan melalui perluasan areal, penyediaan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan perdesaan.
Lingkungan Hidup	Pembangunan sarana pemantauan kualitas air, penerapan teknologi untuk pengendalian pencemaran, pengadaan alat pemantau kualitas udara dan penerapan teknologi pengendalian polusi udara
Keluarga Berencana	Penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB, pelayanan informasi dan akses pelayanan KB untuk masyarakat.
Kehutanan	Meningkatkan fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai), dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah air, serta mendukung mitigasi perubahan iklim.
Sarana Perdagangan	Pembangunan pasar, peningkatan sarana metrologi, dan pembangunan gudang komoditas pertanian.
Sarana dan Prasarana Perdesaan	Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan peningkatan pembangunan perekonomian daerah, kualitas SDM, infrastruktur dan pelayanan dasar
Listrik Perdesaan	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan (EBT), mikro hidro dan EBT lainnya.
Perumahan dan Permukiman	Penyediaan jaringan pipa air minum, septik tank komunal, jaringan distribusi listrik, penerangan jalan umum.
Keselamatan Transportasi Darat	Pengadaan dan pemasangan rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman,
Transportasi Perdesaan	Pembangunan jalan poros desa, penyediaan angkutan perdesaan
Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan	Pembangunan/rehab jaringan jalan, pembangunan/rehab dermaga kecil, moda transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobilisasi angkutan manusia dan barang untuk kawasan perbatasan dan pulau terluar.

- Umum dan Alokasi DAK pada tahun bersangkutan, pada kenyataannya sering kali terlambat, serta seringnya revisi Juknis pada tahun berjalan oleh Kementerian Teknis menghambat dan membingungkan SKPD pelaksana. Hal ini mengakibatkan pencapaian sasaran DAK pada akhir tahun berjalan tidak tercapai.
5. Dana Pendamping 10% dari besarnya alokasi DAK memberatkan APBD karena tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah.
 6. Hasil perhitungan DAK seringkali jatuh pada daerah yang tidak seharusnya mendapat DAK.
 7. Pelaporan DAK oleh daerah sering terlambat bahkan ada daerah yang tidak menyampaikan Laporan penggunaan DAK di daerahnya. Untuk DAK tahun 2010 sampai

8. bulan Oktober saja daerah yang menyampaikan Laporan baru 26%. Gubernur, Bupati/Walikota dan para Kepala Dinas disarankan waspada terhadap praktik penipuan dan praktik pencaloan anggaran transfer daerah, termasuk DAK. Hal ini mengingat maraknya kasus tersebut baik yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Teknis saat ini. Bila mendapati surat/undangan/praktik calo yang datang langsung ke daerah di luar mekanisme perencanaan dan penganggaran, diharapkan Kepala Daerah/Dinas mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan Kemenkeu maupun Kementerian Teknis. ■

Penulis adalah
Widyaiswara Pusdiklat KNP



EDUKASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BAGI DOSEN FAKULTAS EKONOMI

Oleh: Roberto Akyuwen

Pemerintah mempunyai fungsi yang fundamental dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkualitas di segala bidang. Fungsi yang dijalankan secara umum meliputi administrasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan, dan pelayanan publik. Konstitusi memberikan obligasi kepada Pemerintah untuk menjadi motor penggerak bagi *stakeholders* lainnya dalam mencapai tujuan berbangsa dan negara. *Stakeholder* yang sering diterjemahkan menjadi pemangku kepentingan, dalam konteks ini, adalah orang, kelompok, organisasi, atau sistem yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Secara aktual, *stakeholders* pembangunan terdiri dari individu, kelompok atau organisasi masyarakat, pelaku

dalam dunia usaha, tenaga pendidik atau akademisi, dan lain sebagainya. Interaksi di antara Pemerintah dengan *stakeholders* di tingkat pusat maupun daerah akan mempengaruhi efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila terjadi sinergi dalam interaksi tersebut, maka pembangunan dapat berlangsung dengan kondusif dan hasil-hasilnya dapat mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan disparitas antar-kelompok masyarakat maupun antar-wilayah. Sebaliknya, interaksi yang tidak berlangsung dengan baik dapat mengakibatkan timbulnya berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu instrumen penting dan strategis yang digunakan oleh Pemerintah dalam menjalankan

fungsinya adalah keuangan negara atau keuangan publik. Menurut Gruber (2010: 3), terdapat 4 pertanyaan di dalam keuangan negara, yaitu: *When should the government intervene in the economy? How might the government intervene? What is the effect of those interventions on economic outcomes? Why do governments choose to intervene in the way that they do?* Alasan utama Pemerintah melakukan intervensi adalah untuk mengatasi kegagalan pasar dan redistribusi sumber daya. Cara intervensi yang ditempuh dapat berupa pengenaan pajak atau pemberian subsidi serta penyediaan atau pembiayaan barang dan jasa publik. Dampak yang dihasilkan dari intervensi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian. Dalam melakukan intervensi, Pemerintah



(eksekutif) dihadapkan pada proses politik ekonomi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga legislatif sebagai representasi dari *stakeholders*.

Dengan memahami fenomena tersebut, Kementerian Keuangan selaku lembaga Pemerintah yang mendapatkan mandat mengelola keuangan negara berupaya membangun relasi melalui komunikasi publik dengan *stakeholders*, termasuk dengan para akademisi dari perguruan tinggi. *Public relations* merupakan upaya edukasi untuk mengkomunikasikan beragam kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara secara komprehensif dan holistik dengan menggunakan pendekatan yang ramah dengan *stakeholders*. Melalui edukasi ini pula dapat diperoleh gambaran mengenai opini publik, khususnya dari kalangan akademisi, yang senantiasa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, baik dari sisi penerimaan, anggaran belanja, perbendaharaan, kekayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan, transfer ke daerah, dan

lain-lain, termasuk dalam menetapkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang melandasinya.

Pilihan kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan, meskipun telah ditetapkan melalui pertimbangan yang cermat sebagai perwujudan Reformasi Birokrasi, seringkali mendapatkan respon yang berbeda dari para akademisi, terutama yang berkecimpung di bidang ekonomi dan keuangan. Respons yang berbeda pada dasarnya merupakan representasi dari cakrawala pengetahuan teoritis maupun empiris yang dimiliki oleh para akademisi, tersebut. Namun, khazanah ilmu pengetahuan yang dimiliki akademisi seringkali terbatas oleh informasi yang tidak sempurna atau tidak lengkap, sehingga dalam banyak kasus menyebabkan terjadinya interpretasi yang keliru dan nuansa negatif dalam analisis yang dihasilkan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Menyadari akan fenomena tersebut, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan telah menyelenggarakan edukasi publik kepada

para akademisi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang paripurna kepada para akademisi, sehingga tidak hanya mewarnai cara berpikir yang obyektif mengenai pengelolaan keuangan negara, namun juga ditindaklanjuti dalam materi yang diajarkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi dalam perkuliahan.

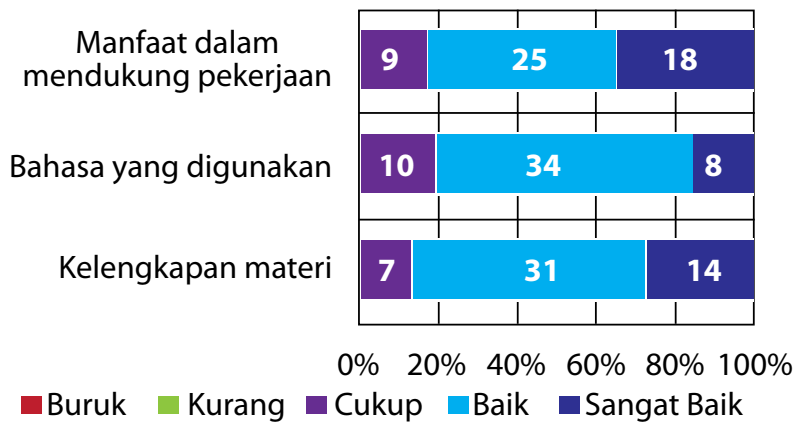
Pelaksanaan Kegiatan

Lokakarya berlangsung selama 1 hari, yaitu pada Senin, 27 Juni 2011 mulai pukul 08.00-18.00 WIB bertempat di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Peserta lokakarya adalah para dosen Fakultas Ekonomi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta undangan dari Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Jumlah peserta lokakarya tercatat sebanyak 100 orang.

Pembicara dan Materi Lokakarya

Sebagai pembicara utama dalam lokakarya adalah Dr. Marwanto Harjowiryo, MA selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Topik

Gambar 1. Persepsi Responden Mengenai Penyampaian Materi Perkembangan Kebijakan Fiskal Nasional



Sumber: Hasil analisis data primer.

yang dipaparkan adalah "Perkembangan Kebijakan Fiskal Nasional". Pembicara selanjutnya adalah Widiyanto, MA, Kepala Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, yang membahas mengenai "Kebijakan Keuangan Negara". Kedua pembicara maupun pembicara-pembicara selanjutnya dimoderatori oleh Dr. Roberto Akyuwen, Widyaiswara Madya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta.

Sesi berikutnya diisi dengan presentasi dari Sarjito, SH, SE, MBA, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dengan materi paparan menyangkut "Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank". Kemudian dilanjutkan oleh presentasi dari Drs. Adriansyah, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, mengenai "Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah". Materi yang terakhir berjudul "Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan Negara" yang disampaikan oleh Drs. Tata Suntara, DESS, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Respons Peserta

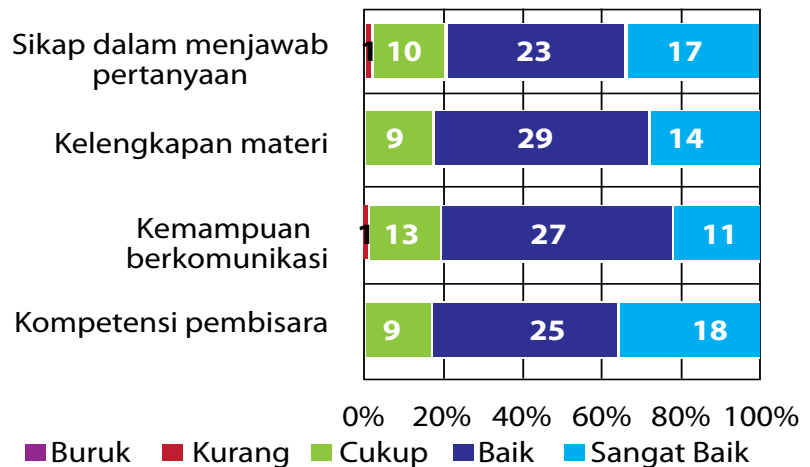
Materi yang disampaikan oleh para pembicara sangat menarik, sehingga mendapatkan respons dari para peserta dalam bentuk pertanyaan dan

pernyataan. Sebagian peserta lainnya berupaya mengkonfirmasi beberapa aspek mengenai pengelolaan keuangan negara yang selama ini masih belum jelas di kalangan akademisi. Seperti mengenai kebijakan transfer ke daerah, kasus-kasus di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, serta hal-hal

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam kuesioner bersifat tertutup dengan kisaran pilihan jawaban meliputi buruk, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Pertanyaan-pertanyaan diajukan secara sistematis untuk setiap materi yang disampaikan. Dari sebanyak 100 peserta, berhasil digali persepsi dari 53 responden atau tingkat pengembalian setara dengan 53 persen.

Tidak dijumpai responden yang menyatakan bahwa materi mengenai Perkembangan Kebijakan Fiskal Nasional yang disampaikan bersifat buruk atau kurang mendukung dalam mendukung pekerjaannya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, mayoritas responden menyatakan materi yang diberikan adalah baik (25 responden atau 47,17 persen), sangat baik (18 responden atau 33,96 persen), dan cukup (9 responden atau 16,98 persen). Kondisi yang sama ditemukan dalam hal bahasa yang digunakan oleh pembicara dan

Gambar 2. Persepsi Responden Mengenai Penyampaian Materi Kebijakan Keuangan Negara



Sumber: Hasil analisis data primer.

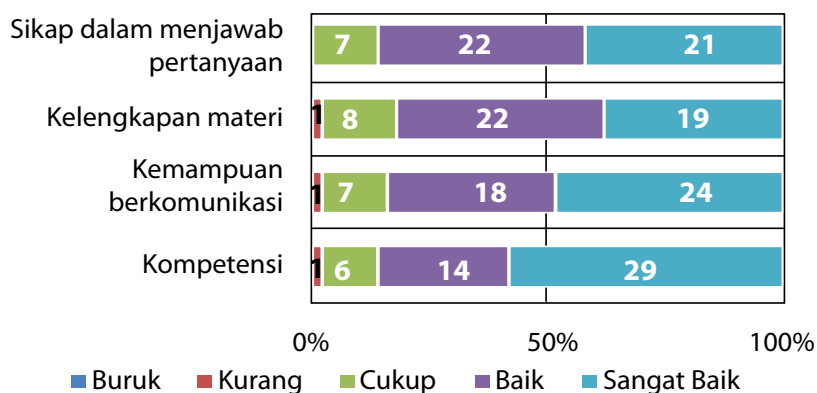
lainnya.

Pada akhir lokakarya, dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi peserta mengenai manfaat yang diperoleh dari materi yang disampaikan, termasuk cara menyampaikan pemaparan.

kelengkapan materi.

Meski demikian, terdapat responden yang mengeluhkan mengenai ukuran tulisan yang digunakan dalam bahan presentasi. Selain itu, responden berharap agar Panitia Lokakarya dapat memberikan materi presentasi dalam

Gambar 3. Persepsi Responden Mengenai Penyampaian Materi Kebijakan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

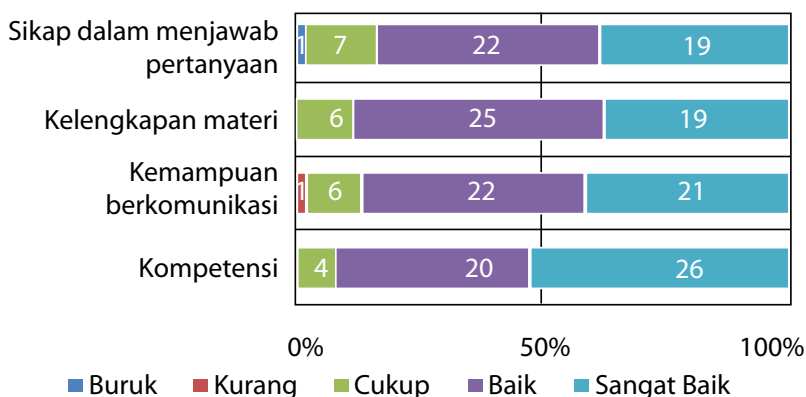


Sumber: Hasil analisis data primer.

bentuk *softcopy* melalui CD atau *email*. Materi yang diberikan dalam bentuk *softcopy* akan sangat bermanfaat bagi para responden dalam menyampaikan bahan kuliah di kelas.

Untuk materi Kebijakan Keuangan Negara, mayoritas responden menilai positif terhadap penampilan pembicara pada sesi ini dalam menjelaskan materi. Sebagai contoh, 25 responden atau 47,17 persen menilai bahwa kompetensi pembicara adalah baik, 18 responden atau 33,96 persen menilai sangat baik, dan hanya 9 responden atau 16,98 persen yang menilai cukup. Tidak dijumpai satupun persepsi responden yang menyatakan kompetensi pembicara buruk atau kurang.

Gambar 4. Persepsi Responden Mengenai Penyampaian Materi Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

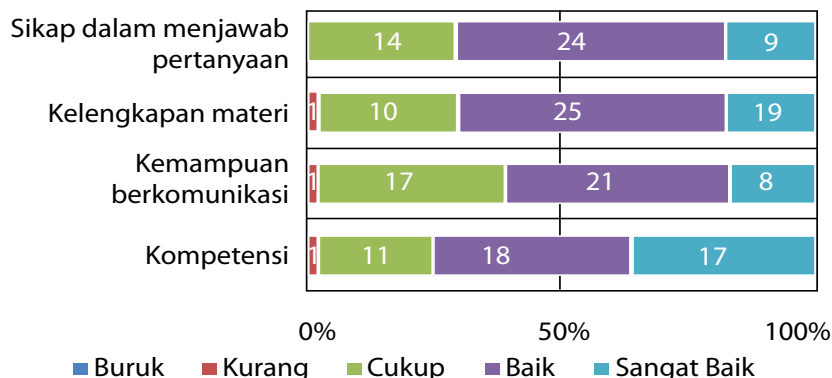


Sumber: Hasil analisis data primer.

Persepsi responden diikuti pula oleh masukan untuk menyempurnakan materi dalam edukasi publik tentang pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang. Beberapa responden berharap agar nara sumber dapat mengungkapkan pendapat dengan lebih tegas terhadap isu-isu yang dibahas. Selain itu, responden berharap agar penyaji lebih banyak menceritakan contoh kasus dan pengalaman yang dihadapi dalam menyusun suatu kebijakan (*best practices*).

Pada sesi penyampaian materi tentang Kebijakan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-

Gambar 5. Persepsi Responden Mengenai Penyampaian Materi Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan Negara



Sumber: Hasil analisis data primer.

Bank terdapat 1 orang responden atau 1,89 persen yang menyatakan bahwa pembicara kurang dalam hal sikap dalam menjawab pertanyaan, kelengkapan materi, kemampuan berkomunikasi, dan kompetensi. Persentase ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan persentase responden yang memiliki persepsi cukup, baik, dan sangat baik. Misalnya mengenai kelengkapan materi, ditemukan bahwa 22 responden atau 41,51 persen memiliki persepsi baik, 19 responden atau 35,85 persen menyatakan sangat baik, dan 8 responden atau 15,09 persen menilai cukup.

Sebagian responden berharap agar pembicara dapat memaparkan contoh

kasus yang pernah dialami dalam menjalankan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan. Misalnya dalam kasus yang menjadi pembicaraan umum, yaitu Bank Century. Selain itu, responden juga mengusulkan agak topik mengenai pasar modal dan lembaga keuangan non bank lebih sering didiskusikan di daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Penyampaian materi mengenai Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara umum mendapatkan respons yang positif dari responden. Sejumlah 22 responden atau 41,51 persen menyatakan kemampuan berkomunikasi dari pembicara adalah baik. Selanjutnya, 21 responden atau 39,62 persen memberikan penilaian sangat baik, 6 responden atau 11,32 persen menilai cukup, dan hanya 1 responden atau 1,89 persen yang mempunyai persepsi kurang. Selain itu, terdapat 1 responden atau 1,89 persen yang memberikan persepsi buruk terhadap sikap pembicara dalam menjawab pertanyaan.

Pada catatan hasil survei, beberapa responden menyampaikan bahwa pembicara telah menyampaikan materi dengan volume suara yang keras, lugas, dan bersemangat, sehingga membuat audiens sangat antusias dalam mengikuti materi. Kebanyakan responden juga mengungkapkan bahwa pembicara telah memaparkan materi dengan lengkap dan menjawab pertanyaan dengan memuaskan. Di samping itu, telah diutarakan beberapa kasus mengenai keuangan daerah yang selama ini banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas.

Materi Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan Negara secara umum mendapatkan respons yang positif dari responden, meskipun terdapat responden yang memiliki persepsi kurang terhadap pembicara. Persepsi kurang dikemukakan oleh masing-masing 1 responden atau 1,89 persen untuk aspek kelengkapan materi, kemampuan berkomunikasi, dan kompetensi pembicara. Untuk sikap

dalam menjawab pertanyaan, diketahui bahwa 24 responden atau 45,28 persen mempunyai persepsi baik, 14 responden lainnya atau 26,41 persen menilai cukup, dan 9 responden atau 16,98 persen menyatakan sangat baik.

Salah satu kritik yang mengemuka dari para responden adalah mengenai volume suara pembicara yang kurang keras, sehingga beberapa bagian dari materi yang disampaikan tidak terdengar dengan jelas. Selain itu, diharapkan agar materi yang dipaparkan dapat dibagikan kepada seluruh peserta lokakarya.

Untuk itu, edukasi publik melalui lokakarya dapat dipandang sebagai salah satu langkah yang efektif dalam rangka meningkatkan pemahaman *stakeholders*. Namun, perlu dilakukan berbagai penyempurnaan dalam hal penyampaian materi maupun penyediaan materi bagi peserta. Selain itu, diusulkan agar intensitas edukasi publik perlu ditingkatkan di masa-masa mendatang, baik melalui lokakarya



Penutup

Banyak pelajaran diperoleh dari kegiatan edukasi publik mengenai pengelolaan keuangan negara kepada para dosen Fakultas Ekonomi. Masih terdapat pemahaman yang belum lengkap mengenai berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk menata keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang lahir dari informasi yang tidak sempurna ini berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dan opini yang tidak tepat mengenai kondisi keuangan negara yang sebenarnya.

maupun forum-forum lainnya. Jumlah peserta tetap perlu dibatasi dan dengan durasi yang tepat, sehingga pokok-pokok pikiran yang diedukasikan dapat terserap secara optimal. ■

Penulis adalah Widyaiswara BDK Yogyakarta

Referensi

Gruber, Jonathan, 2010. *Public Finance and Public Policy*, Third Edition. New York: Worth Publishers.

Telah banyak tulisan atau artikel yang mengungkapkan pentingnya sosok dan tugas seorang pemimpin. Berbagai karya ilmiah populer pun tidak sedikit yang mengangkat tema kepemimpinan sebagai objek bahasan. Kali ini penulis ingin memberikan sedikit urun rembug pemikiran yang didasarkan atas pengalaman dan pengamatan penulis. Mungkin saja tulisan ini tidak memenuhi unsur ilmiah karena memang sengaja penulis kemas secara ringan. Tulisan ini hanyalah melengkapi tulisan-tulisan lain yang bertema sama yaitu tentang kepemimpinan.



Oleh: Chaizi Nasucha

Jenius sebagai kata yang mengikuti kata Pemimpin pada judul di atas memang sengaja dibubuhi tanda kutip. Ya, karena kata Jenius tersebut merupakan rangkaian huruf yang disusun dari beberapa huruf awal berbagai kata berikut ini: **Jeli, Empati, Nonblok/Netral, Intelek, Ulet, dan Spiritual**. Silakan menyimak masing-masing penjelasan kata-kata tersebut.

Jeli

Kata Jeli dipadankan dengan kata awas dan tajam yang dikaitkan dengan penglihatan. Demikian menurut kamus besar bahasa Indonesia. Menurut penulis, seorang pemimpin jenius selayaknya memiliki penglihatan yang tajam. Penglihatan ini tidak hanya didasarkan pada penggunaan indera penglihatan fisik saja yaitu mata, melainkan juga menggunakan indera penglihatan

lainnya yang nonfisik, yaitu "mata hati".

Ketajaman mata hati seorang pemimpin akan terasah seiring dengan proses waktu kepemimpinan yang dilaluinya. Syaratnya cuma satu: ia harus selalu peka dengan lingkungan! Ketajaman mata hati tidak akan terasah manakala kita tidak peduli dengan lingkungan organisasi yang ada. Bila kita mengabaikan lingkungan maka bersiaplah untuk diabaikan oleh lingkungan tersebut. Bila hal ini tidak terjadi sekarang, maka ia akan terjadi di suatu saat kelak. Tinggal menunggu waktu saja.

Banyak kisah yang menceritakan betapa manusia yang mengabaikan lingkungan, maka ia akan diabaikan oleh lingkungan itu sendiri. Contoh klasik yang terjadi misalnya adalah pengabaian manusia akan keseimbangan ekosistem. Saat manusia secara rakus membabat habis lahan hijau,

ia hanya akan dapat menyesali perbuatannya manakala bencana tanah longsor atau banjir bandang menggerus tempatnya bernaung selama ini. Contoh dalam organisasi: saat lingkungan organisasi mengalami perubahan dan kita terlambat untuk mengantisipasi perubahan tersebut dengan cara menyesuaikan diri maka yang akan terjadi adalah keusangan akan organisasi yang kita tempati. Pada dunia bisnis, organisasi yang demikian umumnya akan mengalami kemerosotan omzet atau bahkan mengalami kebangkrutan. Pada dunia birokrasi pemerintahan, organisasi yang demikian tidak akan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang dilayaninya.

Ketajaman mata hatiseorang pemimpin akan terlihat dari ketajaman pola pikir sang pemimpin itu di saat ia memainkan peranannya sebagai

pemimpin sebuah organisasi. Ketajaman mata hati tidak hanya mampu melihat perubahan lingkungan luar organisasi namun juga perubahan di lingkungan dalam organisasi. Perubahan perilaku pegawai karena adanya penerapan aturan baru, misalnya, akan dengan sangat cepat diketahui sang pemimpin yang memiliki ketajaman mata hati. Penurunan kinerja seorang bawahan akan dengan mudah diketahui latar belakangnya tanpa harus menilai secara kasat mata bahwa bawahan tersebut telah menurun prestasi kerjanya dan harus segera dikenakan sanksi! Mata hati akan menuntun sang pemimpin untuk memutuskan tindakan terbaik agar ia tidak semena-mena memberikan sanksi sebelum ia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada penurunan kinerja pegawai tersebut.

Empati

Menurut Hodges dan Klein (2001) pada sebuah Jurnal Sosio-Ekonomi berjudul *Regulating the costs of empathy*, empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi berbeda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, mengaburkan garis antara diri dan orang lain.

Seorang pemimpin jenius harus pula memiliki sifat yang kedua ini yaitu Empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan merupakan hal yang tidak mudah. Kita bisa saja mengakui bahwa dalam diri kita penuh dengan rasa empati. Benarkah demikian? Memiliki sifat empati bagi seorang pemimpin mengandung makna bahwa ia harus menyatu dengan lingkungan organisasi yang ada di sekitarnya, khususnya dengan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam menggapai tujuan tertentu. Menyadari akan apa yang dihadapi seorang bawahan, misalnya, merupakan salah satu produk dari sifat empati. Lebih jauh lagi adalah mampu

merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh bawahan tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa setiap saat kita harus berpikir sebagaimana bawahan berpikir. Namun yang perlu dilakukan adalah mengetahui apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh sang bawahan tadi.

Kemampuan berempati akan menunjang hubungan sosial antara pimpinan dengan para bawahannya. Hubungan sosial yang tercipta dengan baik di antara pelaku organisasi niscaya akan mendatangkan kebaikan bagi organisasi itu sendiri. Organisasi akan dengan mudah mencapai arah yang telah ditetapkan manakala orang-orang yang ada di dalamnya saling memahami tugas dan posisinya masing-masing atau saling berempati. Ketauladanan sang pemimpin yang berjiwa empati akan sangat menunjang kondisi ini.

Nonblok/Netral

Sifat ketiga yang perlu dimiliki seorang pemimpin jenius, penulis pinjam dari istilah yang dipakai **Pak Harto**



di era kepemimpinannya di zaman orde baru lalu yang mengindikasikan

tidak memihak pihak manapun alias nonblok! Tentu saja maksud dari kata ini adalah berada pada posisi netral di antara banyak kubu yang ada.

Dalam berorganisasi, seorang pemimpin tidak boleh hanya memihak pada sebagian pihak saja atau pihak tertentu saja. Seorang pemimpin jenius harus mampu menjadi pimpinan bagi semua pihak. Sifat netral patut dimilikinya agar tidak terjadi kesenjangan di antara pihak yang ada. Bila hal ini tidak mampu ia lakukan, bukan tidak mungkin, pihak yang merasa tidak mendapat perhatian akan mampu mengganggu jalannya organisasi.

Padanan kata lain yang dapat menggambarkan istilah nonblok adalah tidak pilih kasih. Pemimpin jenius tidak akan memfokuskan dirinya hanya pada pihak tertentu saja meskipun pihak tersebut merupakan tulang punggung organisasi. Pemimpin jenius harus menyadarkan dirinya bahwa seluruh elemen yang ada dalam organisasi memiliki peran yang berbeda dan peran yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, masing-masing pihak tentu saja memiliki kontribusi pada organisasi, sekecil apapun kontribusi tersebut.

Sebagai contoh sederhana, yang sering kita saksikan di keseharian kerja kita, adalah peranan *office boy* atau staf *cleaning service* atau *petugas keamanan*. Peran mereka dalam organisasi mungkin saja terlihat kecil. Mereka tidak secara langsung memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Namun bila saja jasa mereka tidak ada dalam kantor, sulit dibayangkan apa yang terjadi dengan kantor tersebut. Akankah pegawai reguler bersedia merangkap pekerjaan tersebut?

Ketidakberpihakan perlu diperlihatkan oleh seorang pemimpin jenius dalam situasi apapun. Terutama saat ia sedang memimpin rapat atau disaat akan mengambil sebuah keputusan strategis. Tentu saja, ia tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan di saat ia harus mengambil sebuah keputusan strategis tersebut. Namun yang perlu dilakukannya adalah



menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukanlah sebuah keputusan yang berpihak pada pihak tertentu saja melainkan sebuah keputusan strategis yang bermanfaat bagi organisasi dan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya.

Intelek

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, intelek adalah daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan. Intelek juga bisa diartikan sebagai daya akal budi atau kecerdasan berpikir. Seorang pemimpin jenius harus pula memiliki sifat keempat ini.

Menurut penulis, syarat mutlak untuk menjadi pemimpin yang intelek adalah memiliki pengetahuan! Pengetahuan menurut wikipedia Indonesia adalah keakraban dengan seseorang atau sesuatu yang dapat mencakup fakta, deskripsi, informasi, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Dari definisi tersebut nampak bahwa pengetahuan di peroleh melalui pengalaman atau pendidikan. Kata sambung yang digunakan di antara kata pengalaman dan pendidikan pada definisi tersebut adalah kata "atau" dan bukan kata "dan". Penulis pun setuju dengan pemilihan kata sambung tersebut. Ini mengindikasikan bahwa

seorang pemimpin intelek tidak harus berlatar belakang pendidikan tinggi. Ia bisa saja memiliki sifat intelek yang berasal hanya dari pengalamannya yang luas. Kombinasi antara pendidikan tinggi dengan pengalaman luas tentu saja merupakan kombinasi ideal yang akan mempertajam sifat intelektualitas sang pemimpin jenius.

Ada yang berpendapat bahwa intelektualitas seseorang akan sangat terlihat saat ia sedang berbicara mengemukakan pendapatnya. Pemimpin intelek umumnya mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaiannya dengan gaya bahasa yang apik. Rangkaian kata ia susun sedemikian rupa sehingga lawan bicara mampu menangkap pesan dengan baik. Ia juga mampu memilah kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Selain itu, ia juga mampu mempengaruhi orang lain dengan ungkapan-ungkapan kata yang dilontarkannya.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, calon pemimpin-pemimpin jenius sebaiknya mulai mempelajari teknik berkomunikasi efektif. Kemampuan intelektual yang terpendam dalam diri namun tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata dalam upaya memberikan *sharing* pengetahuan kepada pihak lain tidaklah berguna. Kemampuan menyampaikan ide/gagasan dengan baik kepada orang lain menjadi penentu

intelek tidaknya kita dihadapan orang lain, apalagi di hadapan bawahan.

Ulet

Selain memiliki sifat Jeli, Empati, Netral, dan Intelek, maka sifat lain yang perlu dimiliki seorang pemimpin jenius adalah ulet (atau keuletan) yaitu sebuah sifat yang menunjukkan sikap tahan banting atau tidak mudah menyerah dengan keadaan. Definisi ulet menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah liat, kuat (tidak mudah putus, tidak getas), dan tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Kata lain yang biasa dipakai untuk mencerminkan keuletan adalah gigih atau kegigihan (*persistence*).

Pemimpin jenius adalah seorang pemimpin yang tidak mudah menyerah. Ia secara gigih akan berusaha menggapai apa yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai sebuah target. Tentu saja, sebagai seorang pemimpin, pencapaian target ini ia lakukan dengan memberdayakan segenap sumber daya yang ada dalam organisasi yang ia pimpin. Dibutuhkan sebuah seni khusus untuk mengelola berbagai sumber daya ini. Seni ini yang dikenal luas sebagai manajemen.

Kemampuan manajemen tinggi yang dibarengi dengan kegigihan dan kemampuan bertahan merupakan kombinasi yang diperlukan untuk

menuju kesuksesan. Pemimpin yang memiliki kombinasi kemampuan ini akan dapat menularkan kemampuannya tersebut, secara langsung atau tidak langsung, kepada seluruh bawahannya. Bila seluruh pelaku organisasi memiliki sifat ulet ini maka bisa dibayangkan betapa luar biasanya organisasi tersebut baik dalam menggapai tujuan maupun dalam menyikapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi.

Keuletan memang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Untuk memunculkan sifat ini dalam diri manusia perlu ditanamkan sikap pantang menyerah sejak dini. Oleh karenanya pemimpin jenius yang memiliki sifat ulet tinggi umumnya berasal dari lingkungan yang memiliki kemampuan "bertahan hidup" yang luar biasa. Kemampuan bertahan hidup ini akan meneguhkan dirinya manakala ia harus menerjang badai demi mempertahankan tujuan yang hendak diraihinya. Ia tidak akan pernah surut untuk berusaha. Segenap tenaga akan ia kerahkan, meskipun dengan susah payah, untuk menjangkau keberhasilan yang mungkin saja masih jauh dari pandangannya. Semangatnya terus menyala meskipun kegagalan demi kegagalan menerpa dirinya. Cibiran pihak lain pun kadang menghampirinya. Namun ia tetap terus bertahan dengan tekad bulatnya. Ia akan terus maju dengan tatapan penuh haus kesuksesan tanpa sedikitpun menolehkan pandangan ke belakang untuk melihat kegagalan di masa lalu.

Contoh sebuah sosok yang mampu mempertahankan keuletannya adalah Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu dan pemegang 1.093 paten penemuan berbeda. Konon ia menemukan bola lampu tersebut setelah mengalami kegagalan sebanyak 10.000 kali dalam percobaannya! Atas hal ini, dengan bijak Edison berujar, *"Saya tidak lah gagal. Sesungguhnya yang terjadi adalah saya menemukan 10.000 cara bola lampu tidak menyala!"*

Spiritual

Kata spirit bersinonim dengan kata jiwa, sukma, atau roh. Kata spiritual

mengandung makna sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan atau rohaniah. Spiritual yang dimaksudkan penulis di sini adalah kedekatan antara manusia dengan sang Maha Pencipta. Tingkat kedalaman ajaran sebuah agama yang merasuk pada diri seseorang sangat berpengaruh pada perilaku diri orang itu sendiri.

Sifat spiritual (ada yang menyebutnya dengan: kecerdasan spiritual) yang harus dimiliki pemimpin jenius merupakan penyempurnalima sifat sebelumnya (Jeli, Empati, Netral, Intelek, dan Ulet). Tanpa sifat ini, jiwa sang pemimpin akan terasa kosong atau hampa. Spiritual mutlak dimiliki oleh setiap pemimpin. Tanpa sifat ini, seorang pemimpin dapat berperilaku semaunya, otoriter, dan arogan. Ia akan menentukan apa yang menurutnya benar atau tepat berdasarkan penalaran semata. Ia mengabaikan kata hatinya yang sesungguhnya memiliki kepekaan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Ary Ginanjar Agustian, pendiri ESQ Training dan penemu ESQWay 165, mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *value*, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan

dengan yang lain.

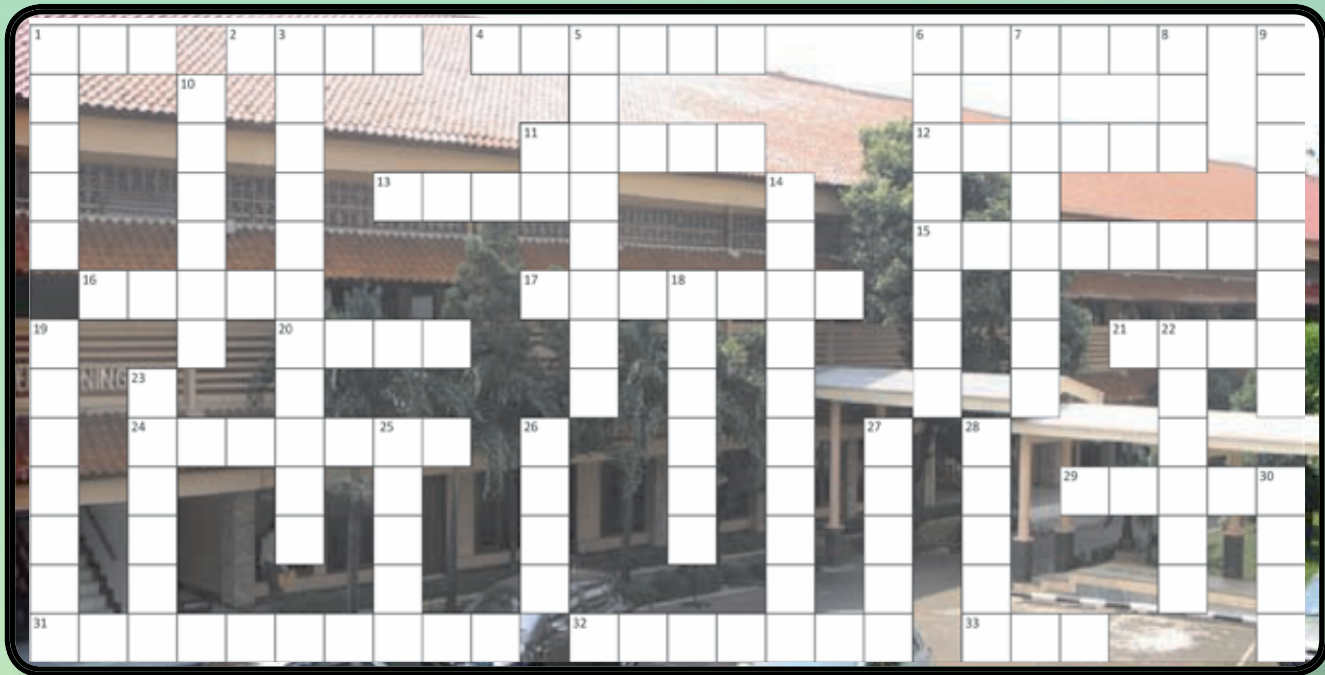
Menurut penulis, spiritual (baca: agama) dapat menjadi rambu bagi pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Bila ia dilema dengan sebuah kebenaran atau tidaknya suatu tindakan, maka ia bisa menjadikan ajaran agama sebagai referensinya. Seorang pemimpin jenius yang memiliki sifat spiritual tinggi, akan galau bila ia memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan dogma agama yang diyakininya. Dalam bertingkah laku pun ia akan benar-benar menjaga sikap dirinya, santun, dan rendah hati.

Kerendahan hati seorang pemimpin akan memudahkannya berinteraksi dengan seluruh staf. Staf pun tidak akan merasa canggung untuk berhadapan dengan pemimpin. Ketidakcanggungan ini akan memberikan nuansa sehat bagi organisasi. Seluruh staf dengan senang hati bersedia memberikan pendapatnya atas setiap kebijakan yang diambil sang pemimpin. Perilaku "bertopeng muka" yang umumnya terjadi di banyak organisasi bila staf berhadapan dengan pemimpin akan tereliminasi dengan sendirinya. Hal ini akan memudahkan sang pemimpin untuk menentukan arah terbaik yang seharusnya dipilih organisasi. ■

*Penulis adalah
Kepala Pusdiklat Pajak*



TTS Keuangan Negara



Mendatar

1. Di antara yang harus disusun satker sebagai data pendukung RKAKL saat pengajuan suatu output/suboutput yang akan dikerjakan pada tahun yang akan datang.
2. Instrumen kebijakan fiskal, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan
4. Kondisi perekonomian yang dilihat dari aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
6. Salah satu jenis belanja, contohnya belanja perjalanan dan pemeliharaan
11. Anggaran yang dialokasikan dan digunakan sebagai transfer kepada pemerintah daerah, BUMN yang tidak merupakan kewajiban
12. Salah satu kondisi agar APBN sehat dan sustainable yaitu APBN menuju berimbang dalam satu ...
13. Dibalik, jenis belanja yang di antaranya berbentuk penambahan dan perbaikan besar-besaran.
15. Penganggaran masa lalu berdasar rincian belanja.
16. Fungsi pertanyaan nomor 9, menjadi penyusunan anggaran tahun berikutnya
17. Fungsi lain dari APBN yang dijalankan oleh pemerintah
20. Salah satu pendekatan reformasi penganggaran saat ini.
21. Mata uang Thailand
24. Salah satu klasifikasi dalam penganggaran
29. Salah satu perbaikan dalam Perpres 54/2010 atas Kepres 80/2008 adalah dalam hal kontrak tahun ini.
31. Pertemuan yang menjadi salah satu tahapan penyusunan APBN
32. Asumsi APBN terkait minyak.
33. Dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai

Menurun

1. Disusun tahunan oleh Kementerian Negara/Lembaga
3. Kerangka penyusunan anggaran dengan menelaah "apa yang akan dicapai?", "apa yang akan dihasilkan?" dan "apa yang akan digunakan?".
5. Kebijakan yang diwujudkan dalam suasana krisis untuk mendorong perekonomian.
6. Patokan dalam rangka penerapan penganggaran jangka menengah
7. Salah satu penertiban oleh Kementerian Keuangan. Satu kantor hanya boleh memiliki satu.
8. Salah satu sumber pendapatan negara dari PPH.
9. Memperhitungkan konsekuensi putusan terhadap tahun berikutnya, biasanya maju.
10. Salah satu cara klasifikasi anggaran yang dikenal.
11. Izin gangguan
12. Salah satu fungsi APBN, dijalankan oleh pemerintah
18. Standar biaya ... yang menjadi salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja.
19. Kebijakan yang diwujudkan dalam suasana krisis terkait besaran anggaran.
22. Digunakan sebagai dasar untuk menghitung postur APBN/APBN-P
23. Masa krisis ekonomi
25. Dibalik, menginput data ke dalam aplikasi, misal aplikasi RKAKL
26. Batas pengeluaran
27. Ketergantungan kita kepadanya tengah kita kurangi
28. Di bawah output terdapat komponen ...
30. Asumsi APBN terkait mata uang.

Jawaban TTS dapat dikirimkan ke email edukasi.keuangan@gmail.com.

Bagi 5 orang pengirim pertama jawaban yang benar dan tepat akan mendapatkan paket Majalah Edukasi Keuangan selama 1 tahun dan souvenir dari BPPK. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Edukasi Keuangan Edisi 8/2011

Disiplin Hidup Gaya Jepang

Oleh: Kodirin

BPPK membuka kesempatan pendidikan lanjutan melalui program beasiswa Pascasarjana untuk program pendidikan dalam dan luar negeri. Kodirin, salah satu pegawai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, berbagi pengalamannya saat menempuh pendidikan di Jepang.

Kesempatan memperoleh beasiswa Professional Human Resource Development Project (PHRDP) Departemen Keuangan saya raih setelah mencoba tiga kali, tahun 2002, 2007, dan 2008. Menurut saya, faktor utama keberhasilan memperoleh beasiswa PHRDP pada upaya saya yang ketiga adalah motivasi yang kuat dan persiapan yang cukup.

Saya kuliah di Graduate School of International Development and Cooperation (IDEC) Hiroshima University (dalam bahasa Jepang Hiroshima *Daigaku*, disingkat *Hirodai*) fakultas *Development Policy*. *Hirodai* menerapkan sistem semester, *Spring* semester mulai awal April sampai dengan akhir Juli; *Fall* semester mulai awal Oktober sampai dengan akhir Februari. Kampus *Hirodai* berlokasi di Hiroshima City dan Higashi Hiroshima. Kampus IDEC terletak di Higashi Hiroshima.

Warga Indonesia yang hidup di Jepang, pasti memerlukan adaptasi budaya yang baru. Akulturasi budaya, aklimatisasi iklim. Di Jepang, kita belajar hidup tertib. Misalnya dalam membuang sampah, terdapat aturan untuk



memilah-milah sampah (*burnable, pet bottle, noxious*, dll). Tiap jenis sampah harus dimasukkan ke dalam plastik sampah yang sesuai dan harus dibuang sesuai jadwal. Sampah yang dibuang tidak sesuai jadwal tidak akan diangkat oleh petugas kebersihan. Salah satu kendala hidup di Jepang adalah bahasa. Pada umumnya warga Jepang di Higashi Hiroshima tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Untuk itu, kita perlu belajar beberapa kosa kata penting, misalnya untuk menanyakan lokasi. Pada waktu saya sampai di Jepang akhir September tahun lalu, suhu udara berkisar 25°C. Selanjutnya suhu udara turun sedikit demi sedikit. Pada awal Februari suhu udara berkisar 1°C pada pagi hari dan 10°C pada siang hari. Kadang-kadang suhu turun sedikit di bawah 0°C disertai turunnya salju. Untuk mengatasi cuaca dingin, saya memakai baju empat rangkap; plus jaket kalau bersepeda.

Warga Negara Indonesia yang tinggal di Higashi Hiroshima sebagian besar berstatus mahasiswa. Mahasiswa Indonesia pada umumnya menempati apartemen dimana terdapat komunitas

Indonesia. Mahasiswa muslim mengadakan pengajian keluarga tiap bulan. Selain itu ada pengajian khusus ibu-ibu dan pengajian khusus bapak-bapak. Adapun warga yang hobi olahraga biasa menyalurkan hobinya tiap akhir pekan.

Hubungan mahasiswa dan *sensei* pembimbing bersifat kekeluargaan. *Sensei* mengizinkan kami untuk meminjam mobilnya. Beliau kadang-kadang mengundang mahasiswa makan untuk memberi penghargaan atas kontribusi/keaktifan mahasiswa di kelas. Saya pernah diajak makan siang karena saya mengoreksi beberapa kesalahan pada buku *sensei*. ■



*Penulis: Pelaksana Tugas Belajar S2
di Hiroshima University*



Fasilitas Video Conference dan Laboratorium Bahasa BPPK

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Penyegaran Penilaian Sumber Daya Alam	31 Oktober - 04 November 2011
DTSS Manajemen Aset	24 Oktober - 03 November 2011
DTSS Penilaian Usaha Dasar	20 Oktober - 15 November 2011
Diklat Penyegaran Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Aksi Korporasi)	17 - 21 Oktober 2011
DTSS Pemandu Lelang	12 - 27 Oktober 2011
Diklat Penyegaran Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Divestasi, Penciptaan Nilai, dan Feasibility Study)	10 - 14 Oktober 2011
DTSS Pemeriksaan Piutang Negara II	05 - 18 Oktober 2011
DTSS Pemeriksaan Piutang Negara III	08 - 22 November 2011
DTSS Penilaian Usaha Lanjutan	07 - 29 November 2011

Pusdiklat Keuangan Umum

DTU TOEFL PBT Preparation Angkatan III	10 - 28 Oktober 2011
DTU TOEFL iBT Preparation Angkatan IV	31 Oktober - 25 November 2011
Workshop Persiapan Purnabhakti Angkatan III	17 - 21 Oktober 2011
Workshop Persiapan Purnabhakti Angkatan IV	14 - 18 November 2011
DTU Business English Angkatan III	24 - 28 Oktober 2011
DF JFA Pembentukan Auditor Ahli	17 Oktober - 04 November 2011
DTU Kepegawaian Angkatan II	10 - 14 Oktober 2011
DTU Knowledge Management Untuk Organisasi Angkatan II	03 - 07 Oktober 2011
Workshop Menulis Ilmiah Populer Angkatan II	15 - 17 November 2011

BDK Cimahi

Diklat Prajabatan Gol.III Periode I	10 - 25 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode II	27 Oktober - 11 November 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode III	14 - 29 November 2011
DTSS Pengelolaan BMN Periode II	31 oktober - 14 november 2011

BDK Yogyakarta

DTSS Bendahara Penerimaan	17-21 Oktober 2011
DTSS Bendahara Pengeluaran Angkatan II	31 Oktober-12 November 2011

BDK Balikpapan

Diklat Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa	3-7 oktober 2011
DTU Kesamaptaan Bea dan Cukai Angkatan II	4 Oktober - 3 November 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode I	10 -25 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode II	27 Oktober- 11 November 2011

BDK Pontianak

Ujian Sertifikasi Keahlian PBJP Periode II	1 oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode I	10 - 25 Oktober 2011

BDK Makassar

Capacity Building Periode II	26 Oktober 2011
Ceramah/Seminar/Diskusi	10 Oktober 2011

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diklat Berbasis Kompetensi III Angkatan II	08 - 11 November 2011
Diklatpim Tingkat III Angkatan 38	03 Oktober - 19 November 2011
Diklatpim Tingkat IV Angkatan 146	17 Oktober - 26 November 2011
Diklat Prajabatan Gol. III Angkatan I	10 - 25 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol. III Angkatan II	27 Oktober - 11 November 2011
Diklat Prajabatan Gol. III Angkatan III	14 - 29 November 2011
Diklat Berbasis Kompetensi IV	22 - 25 November 2011

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Angkatan III	31 Oktober - 04 November 2011
Pengadaan Barang/Jasa Bagi ULP Angkatan VI	24 Oktober - 04 November 2011
Pengadaan Barang/Jasa Bagi ULP Angkatan VII	24 Oktober - 04 November 2011
Pengadaan Barang/Jasa Bagi ULP Angkatan VIII	07 - 18 November 2011
Pengelolaan Keuangan BLU Angkatan I	17 - 28 Oktober 2011
Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat Angkatan VI	03 - 14 Oktober 2011
Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Angkatan IV	14 - 18 November 2011
Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III	07 - 11 November 2011
Pengujian Tagihan Angkatan I	07 - 18 November 2011
Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Angkatan III	31 Oktober - 04 November 2011

Pusdiklat Pajak

Diklat Manajemen Keberatan dan Banding	10 - 14 Oktober 2011
Diklat Manajemen Penagihan	03 - 07 Oktober 2011
Diklat Fungsional Tinggi Pemeriksa	03 - 07 Oktober 2011

Pusdiklat Bea dan Cukai

DTU Kesamaptaan Angkatan III	10 Oktober - 11 November 2011
DTU Kesamaptaan Angkatan IV	7 November- 9 Desember 2011

BDK Medan

DTSS Pengelolaan BMN (Angkatan II)	10 - 21 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode I	10 - 25 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode II	27 Oktober - 11 November 2011

BDK Pekanbaru

Diklat Prajabatan Gol.III Periode I	10 - 25 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode II	27 Oktober- 11 November 2011
Diskusi Panel/Lokakarya	12- 13 Oktober 2011

BDK Palembang

Diklat Prajabatan Gol.III Periode I	10 -25 Oktober 2011
Diklat Prajabatan Gol.III Periode II	27 Oktober- 11 November 2011

ZONA BPPK

Layangkan pertanyaan anda seputar tugas pokok dan fungsi serta program diklat BPPK ke Menu "Hubungi Kami" pada portal www.bppk.depkeu.go.id atau kirimkan via alamat tikbppk@live.com

Tanya

Yeremia listyagung
Email :Jerry.listya@gmail.com
Feedback/Pesan :

Saya mau menanyakan perbedaan beasiswa regular dan linkage. regards,
Yeremia Listyagung Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu

Jawab

Regards,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Yth. Yeremia Listyagung,
Terima kasih telah menghubungi kami, Mengenai program beasiswa yang Saudara tanyakan, Beasiswa Reguler adalah program beasiswa yang penyelenggaraannya dilaksanakan di dalam negeri saja atau diluar negeri saja selama 2 tahun pendidikannya, dan peserta beasiswa regular hanya mendapatkan satu gelar saja. Sedangkan beasiswa linkage adalah program beasiswa yang penyelenggaraannya dilaksanakan sebagiandi Indonesia dan sebagian lagi di luar negeri, dan mendapatkan gelar double degree. Informasi selanjutnya mengenai Beasiswa dapat menghubungi Bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana Pusdiklat PSDM melalui website <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/> Atau langsung datang ke Pusdiklat PSDM dialamat: Gedung K - KomplekKampus STAN, Jalan Bintaro Utama Raya V Tangerang 15222 Indonesia

Tanya

Ainur Rasyid
Alamat Email :ainurrsd@gmail.com
Feedback/Pesan :

ass ww.. mau Tanya pak/ibu bagaimana caranya saya memperoleh hasil TPA dan toefl test ppsdm tahun lalu, terima kasih sebelumnya, Cuma yg lulus aja ya yg dikirim hasil tesnya

Jawab

Regards,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Yth. Ainur Rasyid,
Terima kasih telah menghubungi kami, Pengumuman TPA dan TOEFL PPSDM di website hanya diperuntukkan bagi peserta yang lulus test dan mendapatkan beasiswa. Saudara dapat menghubungi Kasubbid Seleksi dan Penempatan bidang Administrasi Pendidikan Pascasarjana Pusdiklat PSDM melalui website <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/> Atau langsung datang ke Pusdiklat PSDM dialamat: Gedung K – Komplek Kampus STAN, Jalan Bintaro Utama Raya V Tangerang 15222 Indonesia



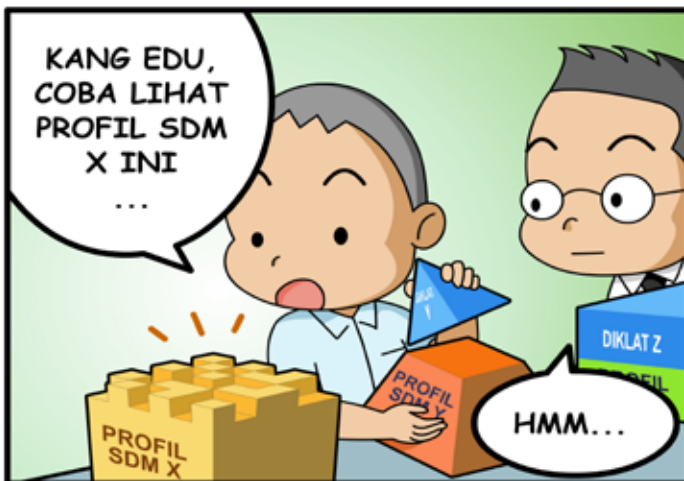
Karikatur

Karikatur

KangEdu

Training Design

Oleh : Bimo



Seminar Pengendalian Intern Pemerintah





Pelantikan Eselon IV BPPK



Jam Krida





NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN



INTEGRITAS

"Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral."



PROFESIONALISME

"Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi."



SINERGI

"Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas."



PELAYANAN

"Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman."



KESEMPURNAAN

"Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik."



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 7/2011

Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp : +62 21 7394666, 7244873
Fax : +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>